

**Modul Diplomasi dan Kebijakan  
Luar Negeri Indonesia  
Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA**



**Program Studi  
Magister Hubungan Internasional  
Universitas Paramadina  
Semester Gasal 2025/2026**



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Modul : Diplomasi dan Kebijakan  
Luar Negeri Indonesia  
Dosen Penyusun : Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA  
NIDN : 0305107607  
Jabatan Fungsional : Lektor 300  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Nomor HP : 0813 2133 9502  
E-mail : peni.hanggarini@paramadina.ac.id  
Perguruan Tinggi : Universitas Paramadina  
Tahun Penyusunan : Semester Gasal 2025/2026

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Hubungan Internasional

Jakarta, 18 September 2025  
Pelaksana




Dr. Ahmad Khoirul Umam  
NIDN: 0326028404



Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA  
NIDN: 0305107607

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban



Dr. Tatok Djoko Sudiarto MIB  
NIDN: 0314126801

## **KATA PENGANTAR**

Modul Perkuliahan Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Semester Gasal 2025/2026 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan yang diselenggarakan pada Program Studi NaHubungan Internasional, Universitas Paramadina.

Materi tersusun dalam 16 bagian bab yang masing-masing menguraikan tujuan yang diharapkan dari pembelajaran. Mahasiswa pun dapat mengevaluasi pemahaman melalui pengerjaan soal-soal latihan yang terdapat pada tiap bab. .

Besar harapan Modul ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa. Selamat Belajar, Semoga Sukses!

Jakarta, 18 September 2025



Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB 1 PENGANTAR DIPLOMASI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA .....	4
BAB 2 KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN DIPLOMASI: DIPLOMASI SEBAGAI <i>INSTRUMENT</i> .....	11
BAB 3 SEJARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA .....	19
BAB 4 POLITIK LUAR NEGERI (LINGKUNGAN INTERNAL) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA .....	28
BAB 5 POLITIK LUAR NEGERI (LINGKUNGAN EKSTERNAL) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA .....	35
BAB 6 PEMBUATAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI .....	41
BAB 7 DIPLOMASI PUBLIK DAN BUDAYA INDONESIA .....	50
BAB 8 LATIHAN SOAL.....	56
BAB 9 KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL .....	57
BAB 10 TEKNOLOGI DIGITAL DAN RUANG SIBER DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA .....	60
BAB 11 ISLAM DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA .....	77
BAB 12 EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA: DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA .....	80
BAB 13 DIMENSI POLITIK DAN KEAMANAN PADA DIPLOMASI INDONESIA .....	83
BAB 14 PERUBAHAN SIFAT DIPLOMASI GLOBAL.....	85
BAB 15 STUDI KASUS DIPLOMASI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA .....	87
BAB 16 LATIHAN SOAL.....	90
DAFTAR REFERENSI.....	91
PROFIL PENYUSUN .....	94

# **BAB 1 PENGANTAR DIPLOMASI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA**

## **Deskripsi Perkuliahan DKLNI**

Kuliah ini memperkenalkan Diplomasi Indonesia dan kebijakan luar negerinya, serta latar belakang teoritis dan sejarahnya.

Mata kuliah ini juga membahas sistem pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia, hubungan bilateral dengan kekuatan besar, hubungan multilateral dengan negara-negara tetangga, negara berkembang dan organisasi internasional.

## **Tujuan Perkuliahan DKLNI**

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang keterlibatan Indonesia dalam politik internasional dalam perspektif sejarah dan kontemporer
2. Meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa mengenai dinamika kebijakan luar negeri Indonesia.
3. Meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa mengenai tantangan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dan strategi untuk mengatasinya.

## **Kemampuan yang diharapkan:**

- Pemahaman RPS: Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen RPS termasuk tujuan, struktur, dan jadwal perkuliahan.
- Pemahaman Mekanisme: Mahasiswa mampu memahami prosedur perkuliahan, termasuk pelaksanaan tugas dan ujian.
- Pemahaman Tata Tertib: Mahasiswa memahami tata tertib perkuliahan yang mencakup kehadiran, partisipasi, dan etika akademik.
- Pemahaman tentang konsep dasar, sejarah, dan posisi Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

### Rencana Perkuliahan:

Berdasarkan tujuan perkuliahan tersebut maka dapat diuraikan rencana perkuliahan dalam 16 (enam belas) pertemuan sebagai berikut:

Pertemuan	Topik	Sub Topik
1	Pembahasan RPS dan Pengantar Perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Pembelajaran Semester</li><li>• Mekanisme perkuliahan</li><li>• Pengantar perkuliahan: konsep dasar, diplomasi dan kebijakan luar negeri</li></ul>
2	Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi: Diplomasi sebagai Instrumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keterkaitan Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi</li><li>• Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>)</li><li>• Diplomasi dan Instrumen Kekuasaan</li><li>• Praktik Diplomasi</li><li>• Aktor Negara dan non-negara dalam Diplomasi</li><li>• Tantangan Pelaksanaan Diplomasi</li></ul>
3	Sejarah Kebijakan Luar Negeri Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Review</li><li>• Pendekatan untuk Analisa Kebijakan Luar Negeri</li><li>• Prinsip dan Tujuan Kebijakan Luar Negeri Indonesia</li><li>• Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa</li></ul>
4	Politik Luar Negeri (Lingkungan Internal) dan Dampaknya terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber Daya Domestik</li><li>• Pengaruh Birokrasi</li><li>• Koordinasi Birokrasi</li><li>• Studi Kasus</li></ul>
5	Politik Luar Negeri (Lingkungan Eksternal) dan Dampaknya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber Daya Internasional untuk Kebijakan Luar Negeri</li><li>• Lingkungan Eksternal-Internal dalam Kebijakan Luar Negeri</li><li>• Pengaruh tatanan dunia terhadap Indonesia</li></ul>

	terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia	
6	Pembuatan Kebijakan Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Perumusan Kebijakan Luar Negeri</li> <li>• Kotak Hitam (<i>Black Box</i>)</li> <li>• Permainan Dua Tingkat (<i>Two Level Games</i>)</li> <li>• Ideosinkretik dan kepemimpinan</li> </ul>
7	Diplomasi Publik dan Budaya Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Diplomasi Publik dan Konsep Diplomasi Budaya</li> <li>• Jenis dan Karakteristik Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya Indonesia</li> <li>• Potensi dan Tantangan Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya</li> <li>• Pendekatan dan Metode Indonesia terhadap Konflik atas Klaim Warisan Budaya</li> </ul>
8	Latihan Soal	Materi Pertemuan 1 sd 7
9	Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia sebagai anggota <i>United Nations</i></li> <li>• Indonesia di luar keanggotaan <i>United Nations</i></li> </ul>
10	Teknologi Digital dan Ruang Siber dan Dampaknya terhadap Diplomasi Digital Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi Digital, <i>Soft Power</i>, dan Diplomasi</li> <li>• Pengertian konsep : Diplomasi Tradisional, Diplomasi Digital dan Diplomasi <i>Cyber</i> (Siber)</li> <li>• Dampak Teknologi Digital terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi</li> </ul>
11	Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam dan Konstitusi 1945</li> <li>• Posisi Indonesia terhadap Konflik di Timur Tengah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi Indonesia terhadap Konflik di Iran Irak</li> <li>• Posisi Indonesia terhadap Konflik di Saudia Arabia Iran</li> <li>• Posisi Indonesia terhadap Peristiwa 11/9, Osama Bin Laden</li> <li>• Posisi Indonesia terhadap Kelompok Minoritas Muslim:</li> </ul>
12	Ekonomi Global dan Dampaknya bagi Indonesia: Diplomasi Ekonomi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi Dunia dalam Perkembangan Ekonomi Global: IMF, World Bank, WTO, G20, OECD</li> <li>• Institusi Dunia yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Indonesia : IMF, World Bank, ADB, WTO</li> <li>• Tujuan Diplomasi Ekonomi Indonesia</li> <li>• Hasil Diplomasi Ekonomi Indonesia</li> </ul>
13	Dimensi Politik dan Keamanan Pada Diplomasi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan</li> <li>• Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Indonesia vs Malaysia</li> </ul>
14	Perubahan Sifat Diplomasi Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Metode Diplomasi</li> <li>• Penambahan Aktor Diplomasi</li> <li>• Perluasan Agenda Diplomasi</li> <li>• Pergeseran Norma Diplomasi</li> </ul>
15	Studi Kasus Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekuensi Diplomasi Indonesia ke China</li> <li>• Tujuan Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo ke China</li> <li>• Hasil Diplomasi Indonesia ke China</li> </ul>
16	Ujian Akhir Semester	Materi Pertemuan 9 sd 15

## Beberapa Sumber Referensi dalam Modul ini:

### Sumber Artikel Jurnal dan Buku

- ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy (2021-2025)*
- Balzacq, Thierry, Frédéric Charillon, Frédéric Ramel (eds.). (2020). *Global Diplomacy. An Introduction to Theory and Practice*. Palgrave Macmillan, Switzerland.

- Berridge, G.R. (2022). *Diplomacy, Theory and Practice*. Palgrave Macmillan. Switzerland.
- Bjola, Cornelius & Marcus Holmes. 2015. *Digital Diplomacy, Theory and Practice*. Routledge, London.
- Gup, Chao Guo and Gregory D. Saxton. (2014). "Tweeting Social Change: How Social Media are Changing Nonprofit Advocacy." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. Vol. 43, No. 1
- Hanggarini, Peni. (2024). Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional. Arta Media Nusantara. Banyumas.
- Hanson, Fergus. 2012. "Revolution @State: The Spread of Ediplomacy," dalam in Adesina. 2017. "Foreign Policy in an era of Digital Diplomacy." *Cogent Social Sciences*. Vol. 3. Issue 1.
- Iswardhana, Muhammad Ridha (2025). "Analysis of President Prabowo's Foreign Policy: Indonesia's Existential Diplomacy in Joining of BRICS and OECD," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 3. September 2025
- Khan, Laeeq et. al. "Public Engagement Model to Analyze Digital Diplomacy on Twitter: A Social Media Analytics Framework," *International Journal of Communication* 15 (2001), 1741-1769.
- Melissen, J. (2005) *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan, Basingstoke. <https://doi.org/10.1057/9780230554931>
- Nip, Joyce Y.M & Sun, Chap. 2022. "Public Diplomacy, Propaganda, or What? China's Communication Practices in the South China Sea Dispute on Twitter." *Journal of Public Diplomacy* Vol. 2, No. 1: 43-68
- Nye, Joseph S. 2004. *Soft Power – The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Pajtinka, E. (2019). Public Diplomacy as a Theoretical Problem: Searching for a Definition. *European Journal of Transformation Studies*, 7(2), 21–32. Retrieved from <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/journal-transformation/article/view/5006>
- Prammeswari, Magfira Insan, Hafid Adim Pradana, and Devita Prinanda. (2025). "Indonesia's Response to the CPO Trade Conflict with the European Union: A Two-Level Games Analysis," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*. Vol. 13, No. 1, hlm. 21-33.
- Seoane, Maximiliano Facundo Vila. (2025). "The Digital Foreign Policies of the US, the PRC and the EU toward Latin America and the Carribean." *The International Spectator*, 1–20
- Setiawan, Asep (2024). "Indonesia's Foreign Policy Trajectory Under President Prabowo Subianto: Balancing Assertiveness and Pragmatism in an

- Evolving Global Order.” *Comserva. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 4. No. 8.
- Siracusa, Joseph .M (2021). *Diplomatic History. A Very Short Introduction*. Oxford University Press, United Kingdom.
  - Sharp, Paul. (2019). *Diplomacy in the 21st Century. A Brief Introduction*. Routledge. Oxon.
  - Shoelhi, Mohammad. (2011). *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
  - Yani, Yanyan Mochmad. (2009). “Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy.” *Sociohumaniora, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 11. No. 1.
  - Yeremia, Ardhitya Eduard. (2020). “Sukarno and Colonialism: An Analysis of Indonesia’s Foreign Policy Discourse, 1955-1961.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 16. No. 1.

#### **Sumber Internet**

- Jager. Jeff Jager (2023) “*American Foreign Policy Decision-Making at the Agency Level: The Department of State as Exemplar?*” <https://www.fp21.org/publications/foreign-policy-decision-making-at-the-agency-level>
- <https://www.voaindonesia.com/a/perbedaan-kebijakan-luar-negeri-biden-dan-trump/5640521.html>
- <https://mediapknonline.blogspot.com/2020/01/peran-indonesia-di-perserikatan-bangsa-bangsa.html>
- <https://www.antaraneews.com/infografik/1906032/lima-resolusi-gagasan-indonesia-disahkan-pbb>
- <https://www.republika.id/posts/58930/apa-maksud-kehadiran-presiden-prabowo-di-beijing>
- <https://jogja.antaraneews.com/berita/778761/dubes-kunjungan-presiden-dan-komitmen-ekonomi-bentuk-eratnya-ri-china>

## Materi Pengantar Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri:

Di sepanjang perkuliahan akan digunakan kerangka pemikiran diplomasi dan kebijakan luar negeri sebagai berikut:



### Latihan Soal Bab 1:

1. Menurut Anda, apakah perbedaan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri?
2. Siapakah aktor diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia yang Anda ketahui?

\*\*\*

## BAB 2 KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN DIPLOMASI: DIPLOMASI SEBAGAI *INSTRUMENT*

### Tujuan Perkuliahan:

Mahasiswa memahami keterkaitan diplomasi dan kebijakan luar negeri serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

### Pokok Bahasan:

1. Keterkaitan Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi
2. Kepentingan Nasional (*National Interest*)
3. Diplomasi dan Instrumen Kekuasaan
4. Praktik Diplomasi
5. Aktor Negara dan non-negara dalam Diplomasi
6. Tantangan Pelaksanaan Diplomasi

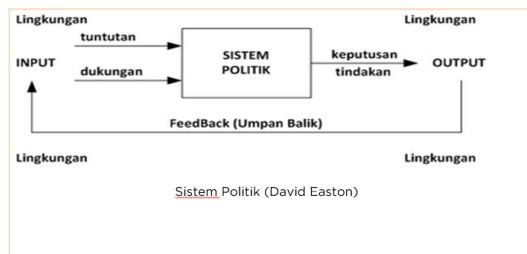
### Kemampuan Akhir yang diharapkan:

Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan diplomasi dan kebijakan luar negeri serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

### Materi:

#### 1. Keterkaitan Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi

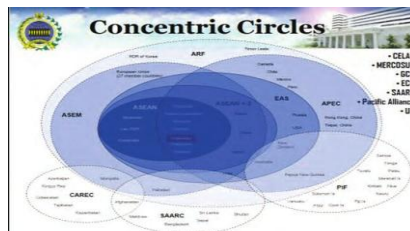
Dapat terlihat pada gambar berikut ini





## Diplomasi

- Diplomasi merupakan **alat** untuk melakukan tindakan para aktor dalam hubungan internasional
- Diplomasi merupakan suatu **seni** untuk mempengaruhi aktor baik dalam kondisi konflik maupun dalam kondisi perang
- Diplomasi merupakan suatu **keahlian** yang perlu dimiliki untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dan juga untuk menciptakan perdamaian
- Diplomasi merupakan keahlian utama yang perlu dimiliki oleh seorang **diplomats/duta** dalam berinteraksi pada praktik hubungan internasional



Contoh interaksi Indonesia dengan beberapa circles negara-negara di masa pemerintahan Soeharto

## 2. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

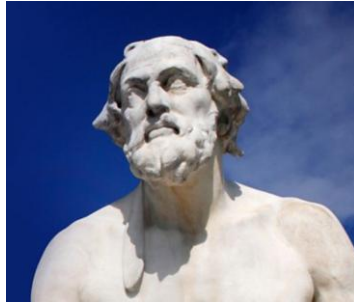
*National interest is used to justify foreign policy*

- *who defines the national interest ?*
- *how is that definition of national interest chosen over others?*

*Elements of national interest:*

- *Wealth*
- *Power*
- *Prestige*

### **3. Diplomasi dan Instrumen Kekuasaan**



Thucydides penulis *History of the Peloponnesian War* 416 SM

*“The strong do what they can and the weak suffer what they must.”*

### **4. Praktik Diplomasi**



- Bukti tertulis menunjukkan bahwa kegiatan diplomasi telah berlangsung lama di India.
- Bukti terlihat pada penggunaan nama tipe utusan: duta, prahita, suta, palgala dan lainnya.
- Abad ke 4 SM Kautilya dalam Arthasastra menulis peranan *power* dalam diplomasi dan juga tentang kenegaraan.

## Diplomasi Modern

- Merupakan dampak dari *Italian Renaissance*
- Profil atau peran duta besar atau *Ambassador* mulai dijalankan.
- Di masa ini mulai terlihat kelembagaan dan tata cara baru dalam diplomasi antara lain
- Perjanjian tidak sekedar dibuat tetapi kemudian diratifikasi secara formal agar dapat menjadi norma
- Adanya pemberian *credentials* dari pemimpin suatu negara kepada Duta Besar dimana sang Dubes akan menyampaikannya kepada pemimpin di negaranya.
- Konferensi multilateral menjadi mekanisme yang paling disukai untuk menyelesaikan masalah internasional pada saat itu.



## Peace of Westphalia (1648)

- Perjanjian Perdamaian yang mengakhiri *The Thirty Years War*
- Disepakainya pendirian negara/kedaulatan
- Konsep kebebasan beragama dan toleransi
- Kementerian luar negeri pertama dibentuk pada 1626 oleh Cardinal Richelieu dari Prancis. Richelieu memperkenalkan pendekatan klasik dalam hubungan internasional yaitu konsep kepentingan nasional dalam hubungan internasional.



- Pada abad 18, Inggris menggunakan diplomasi untuk kepentingan penciptaan *balance of power*
- Pada Abad 19, Metternich dari Austria menggungkan diplomasi untuk merekonstruksi *Concert of Europe*.
- Dapat dikatakan pada periode ini *European Style Diplomacy* diadopsi oleh seluruh masyarakat internasional pada saat itu
- Pendirian *legation* atau *embassy* kemudian dimulai pada pada sekitar 1893



Congress of Vienna (1815)



Brest-Litovsk (1918)



The League of Nations (1919)



Versailles (1919)



The United Nations (1948)

## Diplomasi Era Perang Dingin

- Konfrontasi antara Timur-Barat guna menghindari penggunaan senjata nuklir
- *Crisis diplomacy* yang dilakukan pada saat kondisi mengarah kepada ancaman perang nuklir
- Summit diplomacy yaitu pertemuan langsung antara pemimpin AS dan Uni Sovyet sebagai *super power*

## Diplomasi Publik

- Sebelum Perang Dunia II, diplomasi adalah *government to government relationship*
- Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan dengan adanya tekanan terjadinya Perang Dingin maka pelaksanaan diplomasi telah meluas mencakup *government-to-people connection*
- Edmund Gullion (1965), diplomat AS memperkenalkan konsep Diplomasi Publik yang memungkinkan *private groups* dan *interests group* dapat berinteraksi.
- Menurut Charles Wolf dan Brian Rosen, diplomasi publik adalah:

- Bersifat transparan dan jangkauan kerja lebih luas tidak hanya dilakukan antara *government to government*
- Tema dan isu utama dalam diplomasi public adalah terkait sikap dan tingkah laku publik.

## 5. Aktor Negara dan non-negara dalam Diplomasi

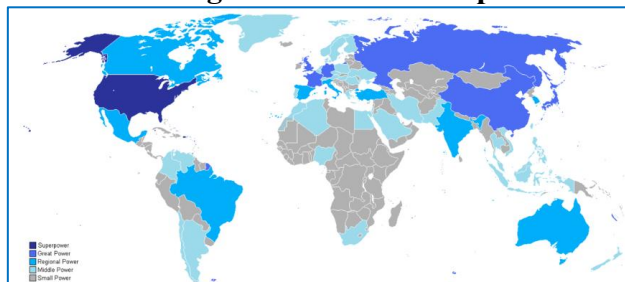
### Diplomasi Era Perang Dingin



### Diplomasi Publik



## 6. Tantangan Pelaksanaan Diplomasi



1. Kurangnya jumlah dan kualitas kapabilitas/keterampilan digital sumber daya manusia
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Konektivitas Akses Infrastruktur & Konektivitas terbatas
3. Keterbatasan Visibilitas dan Pengaruh di dunia Internasional
4. Resiko Tinggi Keamanan Siber
5. Kerentanan terhadap Disinformasi
6. Inkonsistensi Regulasi
7. Kesulitan membadakan audience lokal dan global
8. Kesulitan framing karena melibatkan budaya

**Latihan Soal Bab 2:**

1. Uraikan 2 (dua) contoh studi kasus diplomasi/kebijakan luar negeri suatu negara yang menarik perhatian Anda!
2. Uraikan masing-masing 2 (dua) alasan mengapa topik tersebut menarik!

\*\*\*

## BAB 3 SEJARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

### Tujuan Perkuliahan:

Mengenal dan mengetahui sejarah diplomasi Indonesia dan kebijakan luar negeri Indonesia.

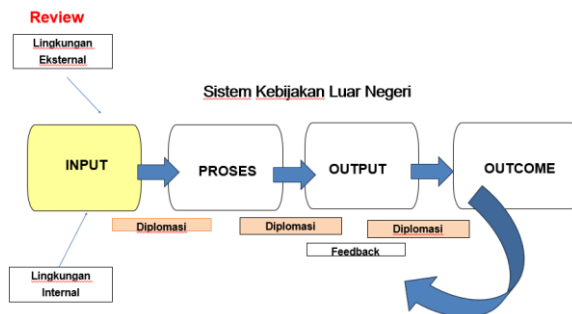
### Pokok Bahasan:

1. Pendekatan untuk Analisa Kebijakan Luar Negeri
2. Prinsip dan Tujuan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
3. Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa

### Kemampuan Akhir yang diharapkan:

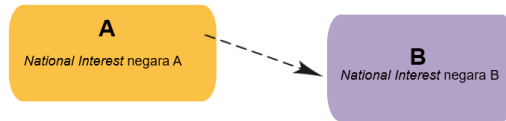
1. Mahasiswa mampu menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam diplomasi internasional berdasarkan perspektif sejarah dan kontemporer
2. Mahasiswa mampu menguraikan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia.

### Materi:



Review

### Kebijakan Luar Negeri (aksi)



### Politik Internasional (aksi dan reaksi)



## Review Analisa Kebijakan Luar Negeri

- *Foreign Policy Analysis* (FPA) mencoba memahami Keputusan PLN atau kebijakan luar negeri suatu negara.
- Kebijakan tersebut merupakan hasil pikiran beragam individu dan hal-hal kompleks yang mempengaruhinya.
- Di awal pengembangan FPA, analisa yang ingin dicapai adalah pemahaman atas *actor specific theories* bukan *actor-general theories* (seperti yang dipahami Realisme).

## Contoh:

- Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga hasil lobi Yahudi yang sangat kuat
- Menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia berarti memecahkan *black box* negara sehingga yang dapat dikaji adalah individu-individunya yaitu Presiden, Menlu, Menhan, Kemlu, Kemhan, Komisi I DPR, dll

## Tiga Generasi FPA

### Generasi Pertama FPA (1954-1974)

- Richard Snyder: perlunya mengkaji proses perumusan KLN bahkan aktor-aktor di bawah level negara (*middle-range theory*)
- Harold and Margaret Sprout: perlunya mengkaji lingkungan psikologis (*psycho milieu*) pembuat keputusan baik individu maupun kelompok

### **Generasi Kedua FPA (1974-1993)**

- Fokus analisa adalah peran kelompok-kelompok kecil (*small groups*) yang memberikan pengaruh terhadap Keputusan, proses organisasi, politik birokrasi
- Analisa juga mencakup perbandingan kebijakan luar negeri (*comparative foreign policy*) misalnya membandingkan perilaku KLN negara yang memutuskan berperang dan yang memutuskan damai.
- Fokus juga terhadap atribut nasional seperti kekuatan ekonomi, militer, sosial, demografi mempengaruhi proses KLN

### **Generasi Ketiga FPA (1993-...)**

- Fokus analisa tidak saja negara tetapi aktor non-state, peranan ide, kesepakatan, fakta sosial, proses pembentukan identitas.
- Pembahasan mencakup penjelasan pentingnya agen dan struktur. Jadi kita bisa menjelaskan perilaku negara sebagai hasil dari pembuatan Keputusan dalam negara. Keputusan memang dibuat (oleh agen) tetapi selalu dalam batas-batas (struktur).

### **1 Pendekatan untuk Analisa Kebijakan Luar Negeri**

- Untuk melakukan analisa kebijakan luar negeri, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah **mendekati** obyek kebijakan luar negeri yang
- Seorang penstudi kebijakan luar negeri yang peka terhadap isu-isu pertahanan keamanan akan cenderung mengambil pendekatan realis yang fokus kepada *clash of interests between states*.
- Tetapi, penstudi kebijakan luar negeri yang peka terhadap isu-isu kerjasama akan cenderung menggunakan pendekatan liberal yaitu misalnya memikirkan cara untuk mengurangi konflik dan mengupayakan *mutual understanding and common interests*.
- Selain dapat mendekati obyek dengan pendekatan-pendekatan Ilmu Hubungan Internasional, kita pun dapat menggunakan

pendekatan yang di luar ilmu HI diantaranya pendekatan sebagai berikut:

1. *Traditional Approach*
2. *Comparative Approach*
3. *Rational Actor Model (RAM)*
4. *Bureaucratic structures and processes approach*
5. *Cognitive processes and psychology*
6. *Multilevel and Multidimensional*
7. *Social constructivist*

### ***Traditional Approach***

- Fokus kepada aktor (*decision makers*) dari kebijakan luar negeri
- Percaya bahwa sejarah kebijakan masa lalu yang perlu ditetapkan untuk mempertahankan kepentingan nasional sebagai faktor penentu kebijakan luar negeri
- Mengutamakan *judgements and common sense* ketika mengkaji kebijakan luar negeri

### ***Comparative Approach***

- Fokus kepada penjelasan sistematis mengenai variable-variable pada kebijakan luar negeri
- Ada kumpulan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Misalnya seperti yang diungkap Rosenau yaitu 5 faktor penting: *idiosinkretik, role, governmental, societal* dan *systemic variables*.
- Dapat juga dilakukan peringkat (rangking) terhadap faktor-faktor tersebut

### ***Rational Actor Model (RAM)***

- Pendekatan ini dilandasi oleh asumsi bahwa aktor adalah rasional tetapi perlu memiliki informasi yang cukup untuk melakukan pilihan kebijakan.

### ***Bureaucratic structures and processes approach***

- Fokus kepada konteks organisasi/birokrasi dari Lembaga yang mengambil keputusan kebijakan luar negeri (Kementerian Luar Negeri).
- Kajian diarahkan kepada proses analisa serta saluran-saluran yang digunakan oleh organisasi untuk mengambil keputusan

### ***Cognitive processes and psychology***

- Fokus kepada *individual decisionmaker* khususnya aspek psikologis dari pengambil Keputusan misalnya persepsi yang bersangkutan terhadap sesuatu.
- Selain itu dapat juga dilihat pengaruh latar belakang individu tersebut dari sisi kepribadian, gaya politik, *political socialization* atau pandangannya tentang dunia.

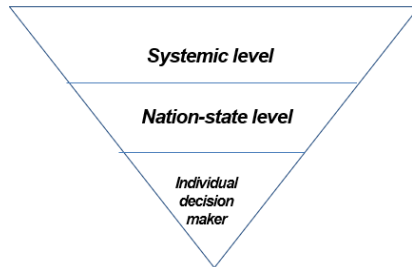
### ***Multilevel and Multidimensional***

- Menggunakan berbagai macam pendekatan untuk memahami kebijakan luar negeri di berbagai level dan dimensi berbeda
- Misalnya menggunakan perspektif liberalis tidak hanya untuk mengkaji *complex interdependence* dan peran Lembaga internasional di Tingkat global tetapi juga mengkaji cara-cara negara menciptakan kerjasama untuk perdamaian

### ***Social constructivist***

- Fokus melihat proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai suatu kondisi *intersubjective* dimana *ideas* berpengaruh dan *discourse* terjadi untuk menghasilkan kebijakan.
- Misalnya *identity* dan *strategic culture* (pengaruh *idea/culture* terhadap kebijakan strategis) mempengaruhi kebijakan suatu negara berperang.

## Tingkat Analisa Kebijakan Luar Negeri



Setelah memilih pendekatan apa yang digunakan untuk menganalisa kebijakan luar negeri, kita selanjutnya dapat menentukan Tingkat analisa kebijakan luar negeri mana yang akan digunakan:

1. *Systemic level* fokus kepada distribusi *power* di antara negara pada sistem internasional misalnya *political and economic interdependence*
2. *Nation-state level* fokus kepada tipe pemerintahan (demokratis atau otoriter), hubungan antara aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat domestik, birokrasi
3. *Individual decision maker* fokus kepada cara berpikir dirinya, *basic beliefs*, pengalaman dan prioritas pribadi

### 3.Prinsip dan Tujuan Kebijakan Luar Negeri Indonesia



Acuan Prinsip Bebas Aktif dalam Pembukaan UUD 1945:

“...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

- Dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada pidatonya berjudul “Mendajung Antara Dua Karang” (*Rowing between two coral reefs*)
- Pidato di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) di Yogyakarta, 2 September 1948.
- *Independent and Active Foreign Policy tidak sama dengan Free and Active Foreign Policy*
- Di lingkungan eksternal: dua kekuatan utama yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet
- Di lingkungan internal: Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, semangat nasionalisme, sikap anti kolonialisme

Menurut Bung Hatta. Indonesia memilih prinsip bebas aktif karena:

1. adanya asumsi bahwa Republik Indonesia akan mempunyai kedudukan yang kokoh dalam politik internasional. Indonesia akan menjadi semacam subyek dalam politik internasional yang berhak untuk menentukan sikap dan memperjuangkan tujuan yang ingin dicapai dan bukan sebagai obyek yang segala sesuatunya diatur oleh pihak lain.
2. Pengalaman revolusi nasional Indonesia yang menghasilkan pandangan ambivalen tentang dunia. Dunia luar penuh dengan kekuatan yang senantiasa mengancam kemerdekaan dan integritas serta mengeksploitasi kekayaan dan posisi yang strategis, sekaligus dianggap sebagai sumber dukungan dan bantuan.
3. Politik bebas aktif bukan sekedar menjamin perdamaian dan persahabatan dengan segala bangsa serta menjamin kebebasan serta kemerdekaan, tetapi juga menambah kesempatan menerima bantuan dari negara manapun untuk kepentingan pembangunan Indonesia.

4. Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak berarti netral karena Indonesia aktif menciptakan perdamaian dunia dan meredakan ketegangan internasional.

### **Pandangan mengenai Politik Bebas Aktif**

- Bagi dunia luar, Indonesia terlihat tidak mau mendukung blok AS dan blok Uni Sovyet serta menjadi blok ketiga yang berperan sebagai mitra bagi kedua blok tersebut
- Bagi lingkungan domestik, prinsip bebas aktif meredakan persaingan antara para elite politik domestik saat itu. Hatta berusaha melahirkan kesatuan nasional dengan mengambil posisi yang tidak terikat menghadapi dunia luar. Saat itu terdapat kelompok kiri (sosialis dan komunis) serta kelompok nasionalis moderat dan Islam konservatif.

## **4. Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa**



**Soekarno (1945–1967):**  
Ideologis dan Konfrontatif



**Suharto (1965–1998):**  
Pragmatis dan Stabilisator



**Habibie (1998–1999):**  
Rasional tetapi impulsif



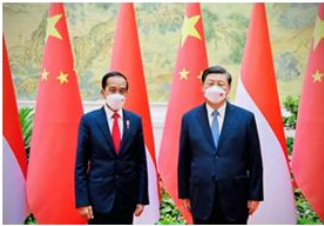
Abdurrahman Wahid (1999-2001)  
Pluralis



Megawati (2001-2004)  
Hati-hati dan simbolik



SBY (2004-2014)  
Diplomatik dan Multilateral



Joko Widodo (2014-2024)  
Pragmatis dan ekonomi-sentris



Prabowo (2024-...)  
Nasionalistik

### Latihan Soal Bab 3:

1. Uraikan perubahan dan kesinambungan kebijakan luar negeri pada dua masa pemerintahan Presiden RI!
2. Apakah Anda sepakat mengenai pandangan bahwa kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan yang mencerminkan nilai nasionalistik?

\*\*\*

## BAB 4 POLITIK LUAR NEGERI (LINGKUNGAN INTERNAL) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

### Tujuan Perkuliahan:

Memahami faktor-faktor pemberi pengaruh dari lingkungan internal kebijakan luar negeri

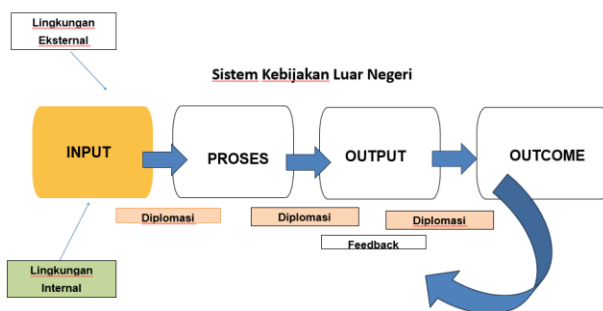
### Pokok Bahasan:

1. Sumber Daya Domestik
2. Pengaruh Birokrasi
3. Koordinasi Birokrasi
4. Studi Kasus

### Kemampuan Akhir yang diharapkan:

Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa faktor pemberi pengaruh dari lingkungan internal kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia.

### Materi:



## Lingkungan Kebijakan Luar Negeri

Rosenau (1969)

negara perlu menyesuaikan perilakunya dengan lingkungannya

Perubahan Internal	Perubahan Eksternal	
	Besar	Kecil
Besar	Reaktif, tidak stabil ( <i>convulsive</i> )	Penuh semangat ( <i>spirited</i> )
Kecil	Penuh pertimbangan ( <i>deliberative</i> )	Rutin ( <i>habitual</i> )

## Faktor-faktor dalam Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi

### Faktor Internal

- Kondisi Geografis
- Demografi
- Kapasitas nasional
- Kekuatan ekonomi
- Kekuatan militer
- Struktur sosial
- Teknologi
- Organisasi politik
- Peran media
- Akuntabilitas politik
- Kepemimpinan (idiosinkretik)

### Faktor Eksternal

- Reaksi negara lain
- Aliansi
- Kerjasama
- Organisasi Internasional
- Norma dan hukum internasional
- Konflik
- *International public opinion*

## 1. Sumber Daya Domestik

- Kondisi Geografis : sebagai ancaman dan peluang  
Contoh : Jokowi dengan *Global Maritime Fulcrum*
- Demografi : Usia produktif, human capital  
Contoh : Tenaga kerja ke luar negeri, pembangunan, diplomasi ekonomi, diplomasi pendidikan
- Kapasitas nasional kemampuan merancang kebijakan luar negeri
- Contoh : Lembaga penunjang kebijakan, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masa SBY
- Kekuatan ekonomi dapat menentukan daya tawar  
Contoh : Infrastruktur
- Kekuatan militer dapat mempertahankan kedaulatan sekaligus menunjukkan *prestige* dan *power*  
Contoh : Kemandirian industri pertahanan, *Integrated Maritime Surveillance System*
- Struktur sosial (pendudukan, agama, ras, dll) memberikan pengaruh kepada kestabilan politik domestik  
Contoh : Penerapan nilai-nilai demokrasi, *Bali Democracy Forum*
- Teknologi dapat menentukan daya tawar  
Contoh : *E-government, Digital Diplomacy, AI*
- Organisasi politik atau insitusi/lembaga yang menentukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri  
Contoh : Konsolidasi, kolaborasi dan sinergi Kemlu dan Kemhan
- Peran media mempromosikan kegiatan diplomasi dan kampanye gagasan  
Contoh : Diplomasi perdamaian Aceh, promosi wisata Indonesia
- Akuntabilitas politik berupa transparansi publik yang dapat mendukung *trust* secara global

Contoh : Diplomasi yang transparan, nilai-nilai anti korupsi di masyarakat

- Kepemimpinan (idiosinkretik)

Contoh : karakter pemimpin yang tegas menentukan kebijakan luar negerinya yang juga tegas

## **2. Pengaruh Birokrasi**

- Secara Struktural : Birokrasi menentukan WHO dan HOW kebijakan luar negeri disusun
- Secara Budaya : Budaya organisasi atau prinsip yang melekat pada Birokrasi dapat mempengaruhi persepsi, ancaman dan strategi diplomasi

Menurut Allison, Graham T. (1971). *Essence of Decision: Cuban Missile Crisis*. New York: Little, Brown and Company

Kebijakan Luar Negeri merupakan hasil dari tarik-menarik (negosiasi) berbagai kepentingan di dalam birokrasi

Contoh: Kemlu-Kemhan-Kemdag

Menurut Hudson, Valerie M. (2014). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Lanham: Rowman & Littlefield.

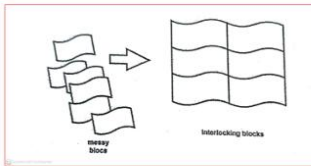
*Institutional constraints and organizational culture* terkait aturan, prosedur, dan pola pikir suatu birokrasi dapat membentuk bagaimana isu luar negeri dipahami dan ditanggapi

## **3. Koordinasi Birokrasi**

Koordinasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Tingkat strategis : Presiden melalui Rapat kabinet terbatas dan rapat dengan Kementerian terkait
2. Tingkat operasional melalui koordinasi atau rapat antar Kementerian dan lembaga (*inter-agency meeting*)

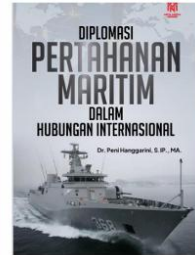
## Contoh Diplomasi Pertahanan Maritim



**Sinergi aktor**  
Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia  
Konsep *Orchestra Interlocking Capacity*  
Hanggarini (2025)



**Konsep Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia 16 arah**  
*Secondary Intercardinal Directions*  
Hanggarini (2025)



Hanggarini (2025)

## 4 Studi Kasus : Review Artikel Pertemuan 3

Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy  
(Yanyan Mochamad Yani)

---

**CHANGE AND CONTINUITY IN INDONESIAN FOREIGN POLICY**

**Yanyan Mochamad Yani**  
Lecturer at the Department of International Relations,  
Faculty of Social and Political Sciences,  
Padjadjaran University  
e-mail: yan2m@hotmail.com

**ABSTRACT.** This article focuses on Indonesian foreign policy change and continuity and then the discussion of foreign policy at present. The analysis is carried out in six periods of Indonesia's foreign policy change and continuity, namely Soekarno's Old Order Era period (1945-1965), Soeharto's New Order Era period (1965-1998), and four Indonesian governments in the Reformation Era; Habibie period (1998-Oct1999), Abdurrahman Wahid period (1999-July 2001), Megawati Soekarnoputri period (2001-October 2004), and Susilo Bambang Yudhoyono period (2004 – now). This paper concludes that since the fall of Soeharto, Indonesia's diplomacy was called upon to play a substantive role in meeting an array of challenges in the economic, political and social fields that threatened the unity, integrity, and sovereignty of the Republic.

Key words: Foreign policy, change, continuity, reform, diplomacy.

Sumber: Yani 2009

**Sukarno and Colonialism:  
An Analysis of Indonesia's Foreign Policy Discourse, 1955-1961**

Ardhitya Eduard Yeremia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>School of International Relations/Research School for Southeast Asian Studies, Xiamen University, China.  
lalisingyeremia@gmail.com

<sup>1</sup>International Relations Department, Faculty of Social and Political Science, Universitas Indonesia, Indonesia,  
yerehi@ui.ac.id

**ABSTRACT**

*For the most part, the literature about Indonesia's foreign policy does not stray far from a descriptive and chronological presentation of the subject. The fact of the matter is that an in-depth analysis of the nation's foreign policy from a different era will impart valuable lessons to the current policymakers in charge of formulating and implementing such a policy. The era of Sukarno bore witness to the implementation of Indonesia's foreign policy that was strong in ideas and practices. Employing discourse analysis, this article seeks to analyze five of Sukarno's speeches, which were delivered in various international forums from 1955 to 1963. During that time, Indonesia put forward a coherent and consistent foreign policy with colonialism as its master signifier. The promotion of such a discourse contributed positively to the diplomatic effort on the issue of West Papua by mobilizing supports from Asian-African nations, as well as attracting the interest of the superpowers. As a result, Indonesia's national interest to bring West Papua into the Republic was well served, and furthermore, Indonesia succeeded in enhancing its image, role, and leadership in world affairs. This experience presents a challenge to the contemporary policymakers in producing a configuration of strong ideas and concepts that would allow the implementation of a foreign policy that serves the national interest, when the nation has once again risen as an important player on international affairs.*

**Keywords:** Indonesian foreign policy; Sukarno; anti-colonialism; West Papua

Sumber: Yeremia 2020



**COMSERVA:**  
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Volume 4 No. 8 Desember 2024

e-ISSN: 2798-5210  
p-ISSN: 2798-5652

**Indonesia's Foreign Policy Trajectory Under President Prabowo Subianto:  
Balancing Assertiveness and Pragmatism in an Evolving Global Order**

**Asep Setiawan**  
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
\*Email: asep.setiawan@umj.ac.id

**ABSTRACT**

Indonesia's foreign policy trajectory under the leadership of President Prabowo Subianto presents both opportunities and uncertainties for regional and global diplomacy. Despite Indonesia's established "berbas ahuf" foreign policy doctrine, Prabowo's prior statements and tenure as Defense Minister suggest a potential shift toward a more assertive and hands-on approach. This study aims to analyze the likely direction of Indonesia's foreign policy during Prabowo's presidency, focusing on regional engagement, relations with major powers, and defense and diplomatic strategies. Using a qualitative descriptive method, the research draws on document analysis of public speeches, policy statements, and historical actions of Prabowo, combined with secondary literature on Indonesian foreign policy. The results indicate that Prabowo is likely to prioritize strengthening Indonesia's role within ASEAN, balancing relations with the United States and China, enhancing defense capabilities, and positioning Indonesia as an influential middle power. However, domestic constraints and limited hard power resources are expected to temper ambitious initiatives. The study implies that Prabowo's foreign policy will blend nationalist rhetoric with pragmatic engagement, aiming to expand Indonesia's strategic autonomy and global influence amid a shifting geopolitical landscape.

**Keywords:** Indonesia, foreign policy, Prabowo Subianto, ASEAN, great power competition, middle power diplomacy

Sumber: Setiawan (2024)

Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora  
Volume 5, Number 3, September 2025  
e-ISSN: 2962-4037; p-ISSN: 2962-4452, Page. 600-616  
DOI: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.7164>  
Available Online at: <https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa>

**Analysis of President Prabowo's Foreign Policy : Indonesia's Existential Diplomacy in Joining of BRICS and OECD**

**Muhammad Ridha Iswardhana**  
International Relations Department, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

Author correspondence: [muhammad.ridha@staff.uty.ac.id](mailto:muhammad.ridha@staff.uty.ac.id)

***Abstract.** Indonesia's decision to join BRICS as a full member on January 6, 2025, marks a significant shift in the direction of national foreign policy. Under the leadership of President Prabowo Subianto, this move is seen as a form of existential diplomacy aimed at asserting Indonesia's position in an increasingly multipolar global order. This study employs a descriptive qualitative approach with a case study method to examine the motives, processes, and impacts of this policy. It utilizes psychological theories of foreign policy and institutional liberalism to explain the case study. The analysis reveals that while BRICS membership opens strategic opportunities, the decision was not entirely based on domestic needs and leaves questions regarding the consistency of Indonesia's foreign policy direction. This study recommends further evaluation of symbolic foreign policies to ensure they align with long-term national interests.*

**Keywords:** BRICS, Existential Diplomacy, Foreign Policy, OECD, Prabowo Subianto

Sumber: Iswardhana (2025)

## Latihan Soal Bab 4:

1. Uraikan masing-masing *argument* utama dari keempat artikel berikut ini!
  - a. Yani (2009)
  - b. Yeremia (2020)
  - c. Setiawan (2024)
  - d. Iswardhana (2025)
2. Sebutkan dan uraikan 3 (tiga) faktor input bagi lingkungan internal kebijakan luar negeri Indonesia!

\*\*\*

## **BAB 5 POLITIK LUAR NEGERI (LINGKUNGAN EKSTERNAL) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Memahami faktor-faktor pemberi pengaruh dari lingkungan eksternal kebijakan luar negeri

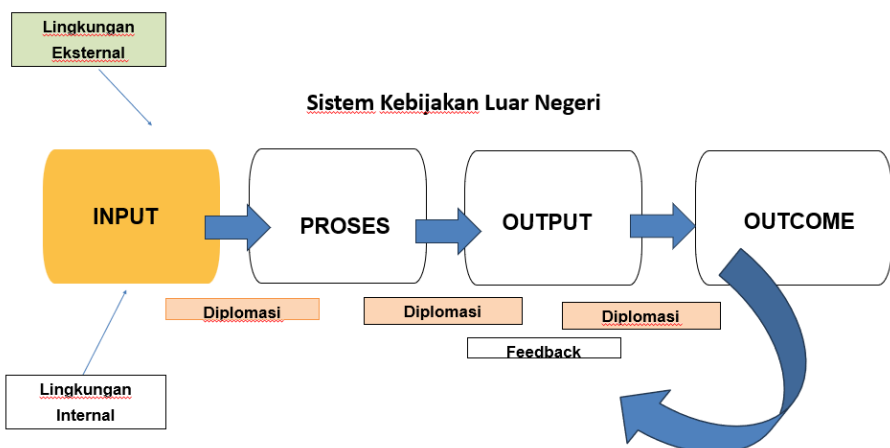
### **Pokok Bahasan:**

1. Sumber Daya Internasional untuk Kebijakan Luar Negeri
2. Lingkungan Eksternal-Internal dalam Kebijakan Luar Negeri
3. Pengaruh tatanan dunia terhadap Indonesia

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

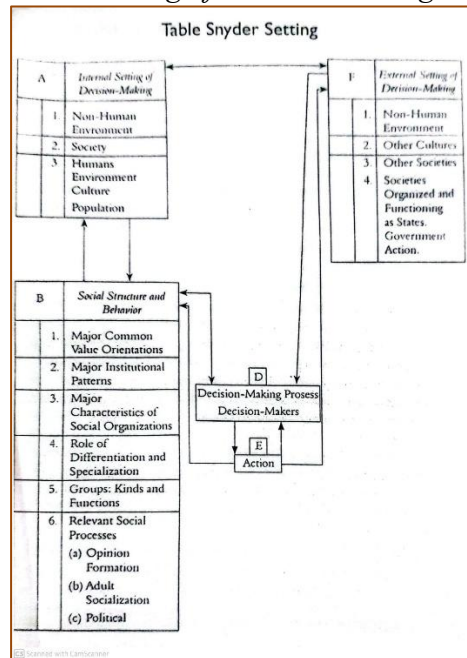
Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa faktor pemberi pengaruh dari lingkungan eksternal kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia.

### **Materi:**



## 1. Sumber Daya Internasional untuk Kebijakan Luar Negeri

- Ada faktor-faktor yang berada di luar faktor suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya.
- Tabel Snyder (Snyder et al, 1962) berikut ini menunjukkannya adanya *external setting of decision-making*.



## 2. Lingkungan Eksternal-Internal dalam Kebijakan Luar Negeri

Menurut Harold and Margaret Sprout 1957

- Hubungan Manusia dengan Lingkungan (*man-milieu relationship*)
- *Milieu* : posisi geografis, perkembangan sejarah, kondisi alam, sumber alam.
- Obyek yang dapat dilihat, pola-pola sosial termasuk lingkungan psikologis

Ada 5 tipe hubungan pengaruh-mempengaruhi:

*Environmental Determinism*

- Lingkungan mempunyai pengaruh mutlak pada manusia
- Manusia tidak punya pilihan kecuali mengikuti kehendak lingkungan
- Contoh: sistem pertahanan Inggris dan Jepang yang sangat ditentukan oleh letak geografis

*Free-Will Environmentalism:*

- Lingkungan terutama lingkungan alam mempunyai pengaruh kuat pada manusia.
- Manusia adalah target dari tanda-tanda alam tetapi manusia dapat memilih

*Environmental possibilism:*

- Lingkungan seperti matriks yang membatasi hasil operasional Keputusan
- Sedikit ruang untuk memilih
- Contoh: keterbatasan teknologi memberikan sedikit pilihan untuk kapabilitas militer sehingga perlu bekerjasama dengan pihak asing.

*Cognitive Behavioralism:*

- Manusia bereaksi terhadap lingkungannya sebagaimana ia mempersepsikan dan menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman masa lampau.
- Sering terjadi kesenjangan antara estimasi para pembuat Keputusan terhadap situasi/lingkungan operasional
- Persepsi menentukan tindakan

*Environmental Probabilism:* Setiap keputusan dijelaskan berdasarkan kesesuaian dengan norma yang bersifat hipotetik.

- Manusia memutuskan berdasarkan pada perilaku yang secara normal akan diharapkan terjadi.

### 3. Pengaruh tatanan dunia terhadap Indonesia

**Anarchy** → Bagaimana geopolitik (faktor geografis seperti lokasi, posisi, dan sumber daya alam) dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia?

Bagaimana tatanan sistem internasional memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia?

#### **Faktor-faktor dalam Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi**

##### **Faktor Internal**

- Kondisi Geografis
- Demografi
- Kapasitas nasional
- Kekuatan ekonomi
- Kekuatan militer
- Struktur sosial
- Teknologi
- Organisasi politik
- Peran media
- Akuntabilitas politik
- Kepemimpinan (idiosinkretik)

##### **Faktor Eksternal**

- Reaksi negara lain
- Aliansi
- Kerjasama
- Organisasi Internasional
- Norma dan hukum internasional
- Konflik
- *International public opinion*

### **Reaksi negara lain**

Tekanan atau ancaman dari negara lain (negara tetangga) yang dapat menjadi *feedback* bagi output kebijakan luar negeri berikutnya

Contoh:

Kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan asap yang merugikan Malaysia dan Singapura.

Ancaman dari kedua negara tersebut mendorong Indonesia mencanangkan diplomasi *haze*.

### **Aliansi**

Orientasi atau arah kebijakan untuk tergabung atau tidak tergabung dalam suatu aliansi yang ada.

Contoh:

Indonesia berupaya melakukan perimbangan dengan keduanya dengan menandatangani *Comprehensive Strategic Partnership* dengan China (2013) dan dengan AS (2015).

### **Kerja sama**

Kerja sama dalam tingkat bilateral, regional, dan multilateral dapat mendukung nilai tawar yang dimiliki oleh suatu negara

Contoh:

*Lombok Treaty* antara Indonesia dan Australia menjadi landasan kuat bagi kerja sama yang lebih erat antara kedua negara.

### **Organisasi Internasional**

Keanggotaan suatu negara di organisasi internasional atau regional mendukung kebijakan luar negeri suatu negara

Contoh:

Keanggotaan dan peran Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mengarahkan kepada kebijakan luar negeri yang mengarah kepada diplomasi kemanusiaan.

## **Norma dan Hukum Internasional**

Norma dan hukum yang berlaku di tingkat internasional dapat membentuk norma atau mendorong gagasan yang mendasari kebijakan luar negeri dan diplomasi.

Contoh:

Ratifikasi berbagai perjanjian global terkait isu lingkungan hidup mendukung diplomasi lingkungan Indonesia

## **Konflik**

Konflik yang terjadi di negara lain atau di tingkat internasional memaksa suatu negara untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya dalam menanggapi fenomena tersebut

Contoh: Invasi Rusia ke Ukraina mendorong Indonesia meneguhkan prinsip *independent and active* serta sebagai *bridge builder*.

## ***International Public Opinion***

Pendapat masyarakat internasional, media internasional, dan lembaga *international non-pemerintah*

Contoh:

- Kecaman negara-negara asing mengenai pelanggaran HAM di Papua mendorong Indonesia melakukan diplomasi publik serta mendorong adanya transparansi dalam kebijakan terkait Papua.
- Kecaman terhadap kekerasan Israel di Palestina mendorong Indonesia semakin menunjukkan dukungan dan simpati kepada perjuangan kemerdekaan Palestina.

## **Latihan Soal Bab 5:**

1. Apa faktor eksternal yang paling mempengaruhi diplomasi dan kebijakan luar negeri Pemerintahan Joko Widodo?
2. Menurut Anda, bagaimana pengaruh tatanan dunia kepada diplomasi dan kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo Subianto?

\*\*\*

## BAB 6 PEMBUATAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

### Tujuan Perkuliahan:

Menguraikan berbagai konsep mengenai pembuatan kebijakan luar negeri.

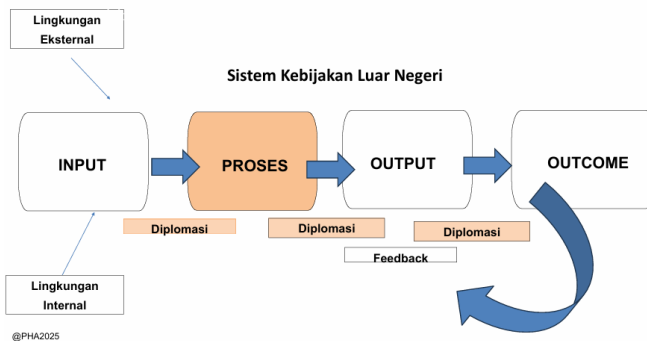
### Pokok Bahasan:

1. Model Perumusan Kebijakan Luar Negeri
2. Kotak Hitam (*Black Box*)
3. Permainan Dua Tingkat (*Two Level Games*)
4. Ideosinkretik dan kepemimpinan

### Kemampuan Akhir yang diharapkan:

Mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri secara konseptual dan empiris dengan menggunakan studi kasus kebijakan luar negeri Indonesia.

### Materi:



### 1. Model Perumusan Kebijakan Luar Negeri

1. *Rational Actor Model* (Model Aktor Rasional)
2. Birokratik Politik Model (Model Politik (Birokrasi))
3. *Organizational Process Model* (Model proses organisasi)
4. *Inter-Branch Politics Model*

## 5. *Political Process Model*

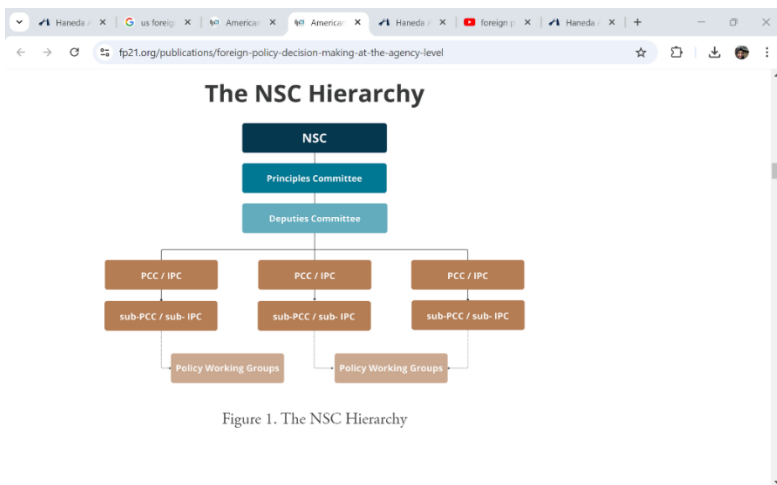
### 1. **Rational Actor Model**

- Model ini bertujuan untuk memahami tujuan dan maksud di balik tindakan kebijakan luar negeri.
- Asumsi pendekatan ini adalah aktor utama dalam kebijakan luar negeri adalah individu rasional yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan terkalkulasi yang memaksimalkan nilai dan manfaat yang dirasakan oleh negara.
- Model aktor rasional bergantung pada interaksi tingkat negara individu antara negara dan perilaku pemerintah sebagai unit analisis
- Ketersediaan informasi yang lengkap bagi para pembuat kebijakan merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan yang optimal.
- Langkah utama dalam proses pengambilan keputusan aktor rasional:
  - mengidentifikasi masalah,
  - mendefinisikan hasil yang diinginkan, mengevaluasi konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan yang ada, dan membuat keputusan yang paling rasional untuk memaksimalkan hasil yang menguntungkan.
- Kritik terhadap *Rational Actor Model* adalah model ini tidak dapat menjelaskan kejadian-kejadian ketika informasi tidak lengkap serta konsep rasionalitas relative subyektif atau adanya faktor-faktor yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang rasional.

## **2. Birokratik Politik Model**

- Model ini menganalisis keputusan berdasarkan premis bahwa tindakan diambil oleh sejumlah entitas independen yang saling bersaing di dalam suatu negara.
- Masing-masing entitas ini membawa nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan, serta pandangannya sendiri mengenai apa yang terbaik untuk kepentingan pribadi, organisasi, dan nasional.
- Setiap pihak berusaha untuk memenuhi tujuannya, yang berarti setiap tindakan kolektif bergantung pada keberhasilan negosiasi dan tercapainya konsensus akhir di antara semua pihak.
- Sifat politik AS yang semakin partisan adalah contoh penerapan model ini.
- Pendekatan politik birokrasi sering disebut-sebut sebagai penjelasan mengapa negara terkadang bertindak tidak rasional. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa model ini tidak cukup menjelaskan kekuasaan yang sangat terkonsentrasi yang dipegang oleh entitas tertentu, seperti cabang eksekutif dalam pemerintahan AS.
- Model ini juga dianggap sangat AS-sentris dan sulit untuk diterapkan dalam konteks gaya pemerintahan lainnya.

Contoh Kasus Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat



Sumber: “*American Foreign Policy Decision-Making at the Agency Level: The Department of State as Exemplar?*” by Jeff Jager (2023)

### 3. Organizational Process Model

- Model proses organisasi memandang pemerintah sebagai gabungan organisasi-organisasi kuat yang bekerja bersama, bukan sebagai individu atau sekelompok entitas partisan.
- Model ini mengkaji keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat dalam batasan-batasan birokrasi yang kaku, di mana tindakan hanya dapat dilakukan dengan otorisasi yang tepat dan sesuai dengan rantai komando, dengan menghormati proses yang telah ditetapkan dan prosedur operasi standar, atau SOP.
- Pemimpin pemerintah tidak menangani lingkup krisis yang lebih luas, melainkan mendelegasikan aspek-aspek yang lebih kecil dari masalah tersebut kepada komite, departemen, dan entitas birokrasi lainnya yang mendukung pemerintah.
- Kritik terhadap model ini adalah: model ini membatasi kemampuan individu untuk bertindak, yang berakibat pada berkurangnya wawasan dan kurangnya perspektif alternatif.

Model proses organisasi juga dapat mengurangi fleksibilitas organisasi secara keseluruhan.

- Namun, penerapan model ini memiliki potensi untuk merampingkan pengambilan keputusan dengan penetapan protokol standar untuk keadaan tertentu dengan hasil yang dapat diprediksi dan terukur.
- Model proses organisasi dapat mengantisipasi kecepatan praktik birokrasi yang terukur dan berusaha menciptakan protokol yang dapat dengan mudah diterapkan jika terjadi krisis.
  - Contoh pada Krisis Rudal Kuba (1962), Presiden John F. Kennedy dengan Pentagon, CIA, dan Angkatan Laut AS melakukan blockade laut terhadap Cuba.
  - Keputusan ini hasil analisis rasional pribadi dan juga mengikuti SOP militer.

**MISI EVAKUASI WNI DI SUDAN**

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dibantu dengan TNI berupaya memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Sudan melalui misi evakuasi yang dilakukan dalam dua tahap.

**KRONOLOGI EVAKUASI**

- 24 April 2023 (tahap I)**  
06.00 WIB  
538 WNI dievakuasi dari Khartoum ke Port Sudan menggunakan 9 bendiarana, kemudian disusul 31 WNI.
- 26 April 2023 (tahap II)**  
09.30 WIB  
328 WNI dievakuasi dari Khartoum ke Port Sudan, menggunakan 7 bendiarana.
- 30 April 2023**  
10.00 WIB  
557 WNI yang dievakuasi pada tahap I tiba di Pelabuhan Jeddah melalui jalur laut. Disusul 110 WNI lainnya menggunakan pesawat TNI.

**WNI DI SUDAN** (Data Kemlu, per 26 April 2023)

25	15	937
Tidak bisa evakuasi	Evakuasi mandiri	Evakuasi pemerintah

**HOTLINE**

KBRI Sudan +249-907978701 +249-900079060 +249-900105466	Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia +6212190070027
--	---

**66** Para WNI akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada otoritas dan pihak-pihak yang ada di Sudan yang telah membantu kelancaran proses evakuasi."

Retno Marsudi  
Menteri Luar Negeri

- Contoh pada kebijakan untuk melakukan evakuasi WNI di Lebanon dan Sudan (2006 dan 2023).
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006) dan Joko Widodo (2023) beserta Kementerian Luar Negeri RI, TNI, KBRI/KJRI dan BNPB

#### **4. *Inter-Branch Politics Model***

- Model politik antar-cabang mirip dengan model proses organisasi dan birokrasi karena melibatkan kelompok atau entitas yang didefinisikan secara terpisah.
- Namun, model ini tidak berfokus pada tujuan dan hasil Tunggal.
- Model politik antar-cabang mengevaluasi tindakan dan hasilnya berdasarkan upaya gabungan dan kekompakan dari berbagai kelompok dan kemajuan mereka dalam mencapai tujuan kolektif.
- Menurut Tan Qingshan, seorang profesor ilmu politik dan Direktur Studi Asia di Cleveland State University yang pertama kali memperkenalkan model ini, entitas birokrasi dan organisasi di dalam dan di luar negara tidak beroperasi secara independen, melainkan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

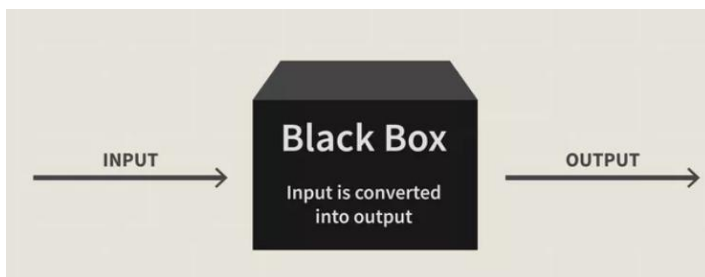
#### **5. *Political Model Process***

- Model proses politik dari analisis kebijakan luar negeri dikembangkan oleh Roger Hilsman dalam bukunya, “The Politics of Policymaking in Defense and Foreign Affairs.”
- Menurut Hilsman, ada sejumlah besar aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terutama terkonsentrasi di kantor Presiden dan Kongres, tetapi juga di semua tingkat pemerintahan.
- Seperti halnya model politik birokrasi, model proses politik menekankan pada tawar-menawar dan keberadaan berbagai pusat kekuasaan yang berusaha mencapai tujuan masing-masing - tujuan-tujuan ini dapat bertentangan atau konsensus dengan tujuan-tujuan yang lain.
- Namun, model ini berbeda dengan model politik birokrasi karena model ini lebih berfokus pada individu partisipan dan tujuan serta pola pikir pribadi mereka tentang politik

internasional daripada organisasi dan kelompok secara keseluruhan.

- Menurut Hilsman, ideologi individu dari setiap aktor politik merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan dan menjelaskan pengambilan keputusan. Kritik terhadap model ini adalah model ini terlalu mirip dengan politik birokratik untuk memberikan kontribusi yang substantif bagi bidang analisis kebijakan luar negeri.
- Presiden AS Barack Obama menandatangani Perjanjian Iklim Paris tanpa ratifikasi Senat (melalui *executive agreement*).
- Presiden AS Donald Trump, menarik AS dari
- perjanjian tersebut pada 2017, dengan dukungan sebagian Kongres dan kelompok industri energi.
- Tetapi negara bagian seperti California dan New York tetap menjalankan kebijakan iklim mereka sendiri sesuai komitmen *Paris Agreement*. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa level pemerintahan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS.

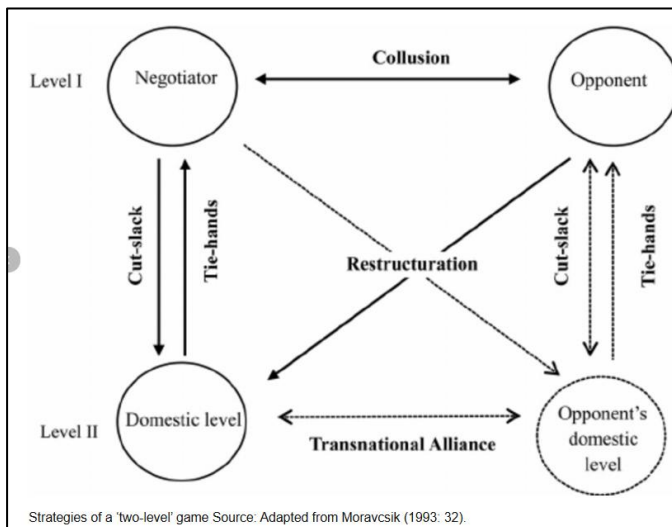
## 2. Kotak Hitam (*Black Box*)



- David Easton → *black box* sebagai proses politik internal yang tidak terlihat
- James N Rosenau → faktor individu, birokrasi dan politik domestik berada dalam *black box*

- Graham Allison → Black box dapat dikaji dengan analisis rasional, organisasi dan politik birokrasi

### 3. Permainan Dua Tingkat (*Two Level Games*)



“Setiap keputusan atau perjanjian dalam kebijakan luar negeri adalah hasil dari dua proses politik yang saling berinteraksi: negosiasi di tingkat internasional (Level I) dan persetujuan atau penyesuaian di tingkat domestik (Level II).” Robert Putnam

### 4. Ideosinkretik dan kepemimpinan

1. Karakter, kepribadian
2. Gaya kepemimpinan
3. Nasionalisme
4. Ideologi
5. Pandangan Geopolitik, visi internasionalisme

6. Pengalaman Hidup
7. Pendidikan
8. Nilai dan norma

### Latihan Soal Bab 6:

1. Bacalah artikel berikut ini! Bacalah artikel berikut ini!  
<https://www.voaindonesia.com/a/perbedaan-kebijakan-luar-negeri-biden-dan-trump/5640521.html>
2. Bacalah artikel berikut ini!

*JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 13 (1) (2025): 21-33, DOI: 10.312189/jppuma.v13i1.14133*

**JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA**  
**(Journal of Governance and Political Social UMA)**

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>

---

**Indonesia's Response to The CPO Trade Conflict with the European Union: A Two-Level Games Analysis**

**Magfira Insan Prammeswari\*, Hafid Adim Pradana & Devita Prinanda**  
 International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,  
 Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Received: 27 January 2025; Reviewed: 27 April 2025; Accepted: 21 June 2025

**Abstract**

The trade conflict between Indonesia and the European Union over CPO arose due to the RED II and EUDR policies, which were deemed discriminatory and potentially harmful to various parties, particularly domestic parties. This study aims to analyze Indonesia's strategy in responding to the conflict by applying Robert D. Putnam's Two-Level Games theory. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature review by examining various written sources that will be validated. The study results show that Indonesia has implemented strategies simultaneously at Level I through international diplomacy and at Level II through the unification of domestic actors and interests. The results indicate that among all the strategies implemented, filing a complaint with the WTO proved to be the most effective step, resulting in a victory for Indonesia. The conclusion of the research indicates that Indonesia's success is not only determined by strategies in the international arena but also by domestic pressure and support. Theoretically, this finding reinforces the understanding of how domestic factors influence foreign policy, while practically, the research suggests that the government should strengthen domestic partnerships and promote joint diplomacy with other countries in facing global trade challenges.

**Kata Kunci:** CPO, European Union, Indonesia, Two-Level Games Theory, Trade Conflict.

**How to Cite:** Prammeswari, M.I., Pradana, A.H., & Prinanda, D. (2025). Indonesia's Response to the CPO Trade Conflict with the European Union: A Two-Level Games Analysis. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 13 (1): 21-33

\*Corresponding author:  
 E-mail: [insanmagfira18@webmail.um.ac.id](mailto:insanmagfira18@webmail.um.ac.id) ISSN 2549-1660 (Print)  
 ISSN 2550-1305 (Online)

\*\*\*

## **BAB 7 DIPLOMASI PUBLIK DAN BUDAYA INDONESIA**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Menguraikan konsep dan contoh implementasi konsep diplomasi publik dan diplomasi budaya berdasarkan studi kasus Indonesia.

### **Pokok Bahasan:**

1. Konsep Diplomasi Publik dan Konsep Diplomasi Budaya
2. Jenis dan Karakteristik Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya Indonesia
3. Potensi dan Tantangan Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya
4. Pendekatan dan Metode Indonesia terhadap Konflik atas Klaim Warisan Budaya

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan konsep diplomasi publik dan diplomasi budaya serta menguraikan berbagai contohnya.

### **Materi:**

#### **1. Konsep Diplomasi Publik dan Konsep Diplomasi Budaya**

- Istilah *Public Diplomacy* ditemukan dalam pemberitaan pers Inggris pada pertengahan Abad 19. Arti Diplomasi Publik saat itu adalah *Good Diplomacy*.
- Istilah *Public Diplomacy* kemudian digunakan pers AS yang mengarah ke arti *open diplomacy* atau diplomasi terbuka tanpa rahasia (Nicholas Cull, Direktur Program Magister Diplomasi Publik University of Southern California)
- PUBLIC DIPLOMACY : "*the means by which governments and private groups influence the attitudes or opinions of other peoples and governments so as to influence their foreign policy decisions.*"

- (Edmund Guillon 1965, Dean The Fletcher School of Law and Diplomacy, Universitas Tufts, Amerika Serikat)

### **Perbedaan Diplomasi Publik dan *Government Public Relations***

	<b>Public diplomacy</b>	<b>Government Public Relations</b>
Purpose	to influence public opinion in order to achieve foreign policy goals	to inform the public in order to maintain government accountability to citizens
Target group	foreign public	domestic public
Method	communication of information by means of dialogue	communication of information by means of dialogue
Instruments	mainly means of mass communication	mainly means of mass communication

Pajtinka 2019

*Public diplomacy* memengaruhi opini publik luar negeri untuk membangun citra positif dan mendukung *national interest*. *Government public relations* merupakan komunikasi pemerintah dengan publik domestik untuk menjelaskan kebijakan, membangun kepercayaan, dan menjaga legitimasi di dalam negeri.

### **DIPLOMASI BUDAYA**

Diplomasi kebudayaan : “suatu usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian maupun secara makro, sesuai dengan ciri khas yang utama seperti propaganda dan lain sebagainya (bukan politik, ekonomi ataupun militer).

Sasaran utama diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum baik pada level nasional maupun internasional dengan harapan pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada

pemerintah maupun organisasi internasional (Warsito & Kartikasari, 2007:4-5).

Contoh diplomasi budaya yang telah dilakukan Indonesia:

- Proses pengusulan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO
- Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO
- Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di berbagai negara
- Pengakuan Batik, Borobudur, Reog Ponorogo sebagai warisan budaya Indonesia

Langkah yang ditempuh dapat terwujud melalui upaya:

- Peningkatan citra negara
- Penguatan dialog antarbudaya
- Pembangunan *international network*

## KTT G20 Bali (15–16 November 2022)



## 2. Jenis dan Karakteristik Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya Indonesia



*“Soft power is the ability to get what you want through **attraction** rather than coercion or payments. It arises from the attractiveness of a country’s culture, political ideals, and policies.”*

(Joseph Nye, 2004)

- Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya merupakan **soft power**
- *“The ability of a country to shape the preferences and behaviors of others through appeal and attraction rather than coercion or payment.”*
- The ability to achieve what one wants not through coercion or bribery, but through attraction
- ‘soft power’ of any country rests on three sources: political values, foreign policies and culture (Joseph Nye, 2004)



*“Soft power refers to the persuasive approach in diplomacy, emphasizing attraction and co-optation rather than coercion, and often*

*operationalized through public diplomacy activities.”*  
(Jan Melissen, 2005, p. 4)

- Tidak ada unsur paksaan
- Unsur persuasi
- Solusi untuk membahas isu global yang melibatkan kepentingan publik internasional

Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya Indonesia:

1. Dilakukan berdasarkan identitas yang telah diakui bersama
2. Dilakukan melalui media digital atau *people to people interaction*
3. Diplomasi sejalan dengan kepentingan nasional misalnya pengejaran kepentingan ekonomi bangsa



Penampilan Saung Angklung Udjo di *World Expo 2025* Osaka Jepang

Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya Indonesia dilakukan melalui

- Promosi Budaya dan Literature oleh KBRI dan KJRI
- Kerja sama dan Kolaborasi program pertukaran budaya di tingkat mahasiswa, pemberian beasiswa pendidikan untuk studi di Indonesia
- Pameran Seni dan Budaya
- Masyarakat diaspora Indonesia (generasi tua, generasi muda, mahasiswa/pelajar)

### 3. Potensi dan Tantangan Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya

- Kekuatan sumber *soft power* : budaya, industry kreatif,
- Penggunaan media digital mempermudah kinerja diplomasi
- Masyarakat (publik) Indonesia dari berbagai generasi sebagai penggerak baik yang tinggal di Indonesia maupun diaspora di luar negeri

### 4. Pendekatan dan Metode Indonesia terhadap Konflik atas Klaim Warisan Budaya



### Latihan Soal Bab 7:

1. Apakah perbedaan antara diplomasi budaya dan diplomasi publik?
2. Sebutkan satu contoh diplomasi budaya yang dilakukan di masa pemerintahan Prabowo Subianto!
3. Sebutkan satu contoh diplomasi publik yang dapat dianggap sebagai Langkah diplomasi yang berhasil dilakukan Indonesia pada suatu negara!

\*\*\*

## BAB 8 LATIHAN SOAL

### **Tujuan Perkuliahan:**

Mahasiswa mengetahui dan memahami inti materi Bab 1 hingga Bab 7

### **Pokok Bahasan:**

Intisari Bab 1 hingga Bab 7

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mendasar Diplomasi Digital
- Mahasiswa mampu menggunakan konsep Diplomasi Digital untuk menganalisa studi kasus Diplomasi Digital

### **Materi:**

1. Apakah yang menjadi landasan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia? Uraikan mengapa Indonesia memilih landasan tersebut? Bagaimana pihak luar memandang Indonesia? Berikan 1 (satu) contoh implementasi landasan tersebut pada diplomasi/kebijakan luar negeri pada salah satu masa pemeritahan Indonesia!
2. Apa sajakah faktor-faktor internal yang mempengaruhi diplomasi dan kebijakan luar negeri suatu negara? Uraikan 3 (tiga) faktor internal yang penting pada suatu kasus diplomasi/kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Joko Widodo! Tuliskan sumber referensi yang digunakan!
3. Bagaimana tekanan dari negara lain dan keputusan untuk beraliansi atau tidak beraliansi dapat mempengaruhi diplomasi/kebijakan luar negeri suatu negara? Uraikan jawaban Anda dalam 2 (dua) contoh kasus diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia! Tuliskan sumber referensi yang digunakan!

\*\*\*

## **BAB 9 KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Memahami posisi Indonesia dalam kebijakan luar negeri sebagai anggota Organisasi Internasional.

### **Pokok Bahasan:**

1. Indonesia sebagai anggota *United Nations*
2. Indonesia di luar keanggotaan *United Nations*

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

Mahasiswa mampu menjelaskan posisi Indonesia dalam kebijakan luar negeri sebagai anggota Organisasi Internasional.

### **Materi:**

#### **1. Indonesia sebagai anggota United Nations**

- Pada 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60. Keputusan ini disetujui oleh seluruh negara anggota PBB saat itu dan terjadi setelah kurang dari setahun pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar.
- PBB yang berdiri pada tahun 1945, mendukung pula kemerdekaan Indonesia.
- Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan

Renville. Pada saat terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.



Sumber:

<https://mediapknonline.blogspot.com/2020/01/peran-indonesia-di-perserikatan-bangsa-bangsa.html>

## 2. Indonesia di luar keanggotaan United Nations

Selain sebagai anggota PBB, Indonesia juga tergabung dalam Non Aligned Movement, ASEAN, OIC, APEC, dan G20.

## Latihan Soal Bab 9:

- Mari kita kaji beberapa peran Indonesia di PBB melalui infografis berikut ini. Sumber dari <https://www.antarane.ws.com/infografik/1906032/lima-resolusi-gagasan-indonesia-disahkan-pbb>



- Meskipun Indonesia telah berperan banyak di United Nations, di masa pemerintahan Sukarno, Indonesia sempat keluar dari UN. Mengapa? Uraikan!

\*\*\*

# BAB 10 TEKNOLOGI DIGITAL DAN RUANG SIBER DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA

## Tujuan Perkuliahan:

Memahami pengaruh teknologi digital dan ruang siber terhadap diplomasi digital Indonesia.

## Pokok Bahasan:

1. Teknologi Digital, *Soft Power*, dan Diplomasi
2. Pengertian konsep : Diplomasi Tradisional, Diplomasi Digital dan Diplomasi *Cyber* (Siber)
3. Dampak Teknologi Digital terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi

## Kemampuan Akhir yang diharapkan:

Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh teknologi digital dan ruang siber terhadap diplomasi digital Indonesia.

## Materi:

### 1. Teknologi Digital, *Soft Power*, dan Diplomasi

Salah satu faktor mendorong Diplomasi Digital dan Diplomasi *Cyber* adalah revolusi ICTs.



... *Information and communication technologies (ICTs) have revolutionized the way people communicate and exchange information, changing political, social and economic landscapes across the globe...*Faye (2000)

## Soft Power

*“Soft power is the ability to get what you want through **attraction** rather than coercion or payments. It arises from the attractiveness of a country’s culture, political ideals, and policies.”*

(Joseph Nye, 2004)



*“Soft power refers to the **persuasive** approach in diplomacy, emphasizing attraction and co-optation rather than coercion, and often operationalized through public diplomacy activities.”*

(Jan Melissen, 2005, p. 4)

- Tidak ada unsur paksaan
- Unsur persuasi
- Solusi untuk membahas isu global yang melibatkan kepentingan publik internasional

## 2. Pengertian konsep : Diplomasi Tradisional, Diplomasi Digital dan Diplomasi Cyber (Siber)

### Pengertian Konsep Diplomasi Tradisional vs Diplomasi Digital

#### Diplomasi tradisional

Praktik komunikasi resmi antar-negara yang dilakukan melalui saluran formal.

- Diplomasi adalah seni dan praktik mengelola hubungan antar-negara, menjaga kepentingan nasional, serta menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
- Aktor Diplomasi tradisional : diplomat profesional, duta besar, dan kementerian luar negeri. (Berridge, 2015)

#### Diplomasi Digital

- Praktik komunikasi resmi antar aktor diplomasi dengan menggunakan teknologi informasi, tetapi juga strategi komunikasi

luar negeri yang memanfaatkan media sosial, situs web resmi, dan platform digital lain untuk menyampaikan pesan, membangun citra, serta terhubung dengan khalayak global secara langsung (Bjola & Holmes, 2015)

- Adanya upaya perluasan diplomasi mencakup media digital dan platform daring.

Media digital : isi berita atau materi yang dibuat secara digital tidak lagi secara cetak.

- Contoh: artikel online di portal berita (detik.com, Kompas.com), infografis di website atau aplikasi, video (*YouTube, film streaming*), *Podcast*

*Platform daring (online platform)*: wadah berbasis internet yang memfasilitasi distribusi dari media digital

- Contoh: Media sosial (*Instagram, TikTok, Facebook*), *e-commerce (Shopee, Amazon)*, *e-learning (Moodle, Coursera)*

Lalu apa yang dimaksud dengan *Platform digital*?

Platform digital : perantara daring yang memungkinkan interaksi antar pengguna serta memfasilitasi pertukaran barang, jasa, atau interaksi sosial.

Contoh: Aplikasi *Android, Zoom, Netflix, Grab, Gojek*

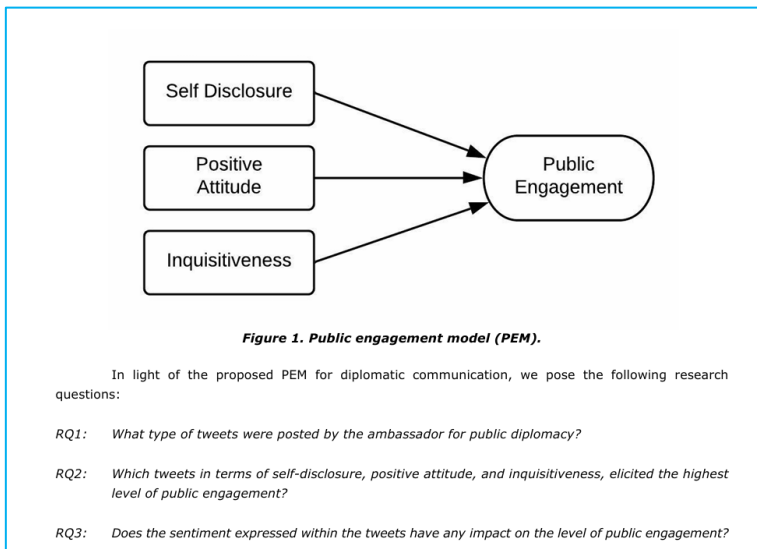
## **Digital Diplomacy**

The use of the internet and new Information Communications Technologies to help carry out diplomatic objectives (Hanson 2012 in Adesina 2017)

### **Tujuan Diplomasi Digital**

1. *Knowledge management*
2. *Public diplomacy*
3. *Information management*
4. *Consular communications and response*
5. *Disaster response*
6. *Internet freedom*
7. *External resources*
8. *Policy planning*

## Contoh Penelitian: Analisa Kasus Diplomasi menggunakan Platform Online/Digital



### Sumber:

Khan, Laeeq et. al. "Public Engagement Model to Analyze Digital Diplomacy on Twitter: A Social Media Analytics Framework," *International Journal of Communication* 15 (2001), 1741-1769.

Cuitan dari akun Twitter Duta Besar Jerman (Ambassador Martin Kobler) selama dua tahun (tweet asli dalam bahasa Inggris)

### Catatan:

- ***Self-disclosure*** : pengungkapan diri (misalnya informasi personal, cerita pribadi) yang membuat komunikasi terasa lebih manusiawi dan dekat.
- ***Positive attitude*** : sikap positif, ramah, sopan, optimis dalam interaksi.
- ***Inquisitiveness*** : rasa ingin tahu, mengajukan pertanyaan, mengundang dialog atau masukan publik

- **Public Engagement Model (PEM)** yang memperlihatkan faktor-faktor yang mendorong engagement publik di media sosial dalam konteks diplomasi digital.

Analitik → Interpretasi

- Analisa teks: 9 tema besar dalam *tweet ambassador*:
  1. Demokrasi
  2. Politik dan hukum
  3. Masyarakat dan budaya
  4. Konflik dan kekerasan
  5. Kepribadian
  6. Lingkungan dan Kesehatan
  7. Pembangunan ekonomi dan sosial
  8. Kehidupan pribadi
  9. Urusan kedutaan
- Analisa *engagement*: kepribadian yang ramah dan mengajukan pertanyaan kepada publik, berhasil menjalin interaksi digital yang menarik di Pakistan dengan ribuan interaksi



### 3. Dampak Teknologi Digital terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi

Bagaimana China menggunakan Twitter dalam wacana sengketa Laut China Selatan?

**Table 2.** China accounts that received 20+ retweets in the dataset

Twitter username	User real name	Nature of account	No. of original tweets (T=933)
BeijingReview	Beijing Review	Central-level state media	22
CCTV	CCTV	Central-level state media	15
CCTV_Plus	CCTV+	Central-level state media	56
cgtnamerica	CGTN America	Central-level state media	3
CGTNOfficial	CGTN	Central-level state media	71
China_Focus	China Focus	Central-level state media	0
ChinaDailyAsia	China Daily Asia	Central-level state media	30
ChinaDailyUSA	China Daily	Central-level state media	16
chinaorgen	China.org.cn	Central-level state media	14
ChinaPlusNews	China Plus News	Central-level state media	36
Echinanews	China News 中国新闻网	Central-level state media	13
globaltimesnews	Global Times	Central-level state media	191
PDChina	People's Daily, China	Central-level state media	135
XHNews	China Xinhua News	Central-level state media	112
yicaichina	Yicai Global 第一财经	Local-level business media	11
SCMP_News	SCMP News	Local-level (Hong Kong) media	113
chinascio	China SCIO	Central government	32
ChinaUSFocus	China US Focus	NGO based in Hong Kong	59
ez (anonymized for privacy)	(hidden for privacy)	Chinese citizen	4

Nip, Joyce Y.M & Sun, Chap. 2022. “Public Diplomacy, Propaganda, or What? China's Communication Practices in the South China Sea Dispute on Twitter.” *Journal of Public Diplomacy* Vol. 2, No. 1: 43-68

- Penelitian mengkaji tweets dari akun-akun aktor China selama 4 November 2016 - 7 Juni 2018.
- hastag #SouthChinaSea
- 14 official central-level state (media), two local-level news media, one government, one NGO, and one citizen account
- Hasil Temuan:
  - Cenderung monolog bukan dialog
  - White propaganda/basic public diplomacy, bukan propaganda hitam penuh (black propaganda), meskipun ada elemen “abu-abu” (grey propaganda)

Siaps saja actor Diplomasi Digital selain Aktor Negara? Mengapa Digital Diplomacy sering disebut sebagai multi actor Diplomacy?

1. Non Government Organization
2. Multinational Company

3. Individu, influencer
4. International Non Governmental Organization (NGO\_
5. Diaspora Komunitas Transnasional

*Contoh: Individu, Influencer*

Tujuan:

Publik figure, activists, influencer dapat membangun narasi alternatif, mempengaruhi publik internasional

Media:

*Digital activism*

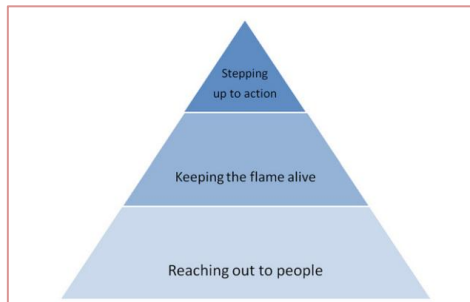


Emma Watson

UN Women Goodwill Ambassador



***Contoh: Non Government Organisation (NGO)***



*A pyramid model of social media-based advocacy*  
Sumber: Guo & Saxton (2014)

**Tujuan:**

Advokasi isu (lingkungan, HAM, pembangunan), isu non-profit dalam bentuk:

- Memberi informasi kepada *stakeholder*
- Membangun komunitas (*community building*)
- Menyarankan tindakan (*calling to action*)

Media:

- Kampanye daring, website, media social

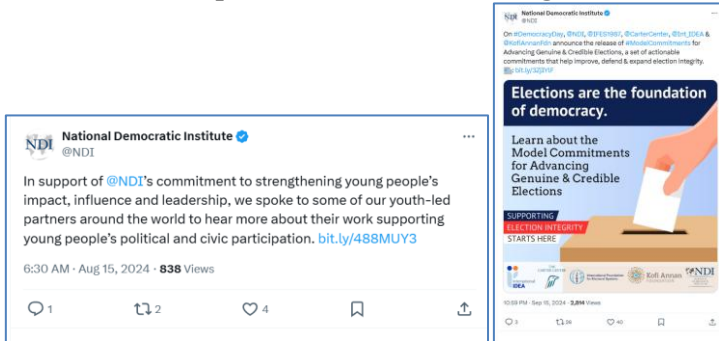
Contoh: *Taiwan Digital Diplomacy Association (TDDA)*

**Table 4.** Advocacy Tactics present in 750 Random Tweets, April 2012.

Advocacy tactic	Example	Frequency	(%)
Public education	CCHR: Psychiatrist and former DSM chairman Allen Frances admits: There are no objective tests in psychiatry <a href="http://t.co/axCUx5Sj">http://t.co/axCUx5Sj</a>	303	40.4
Grassroots lobbying	FreedomWorks: Over 200,000 have signed the petition to end #Obamacare. <a href="http://t.co/O9nkLbelHaveyou#tlot">http://t.co/O9nkLbelHaveyou#tlot</a>	18	2.4
Public events & direct action	GoAffirmations: Join us in Lansing tomorrow at 10:30-we're announcing 50+ electeds' support for our work! <a href="http://t.co/5dcswr54#mpolitics">http://t.co/5dcswr54#mpolitics</a>	15	2
Voter registration & education	MakeTheRoadNY: Great work everybody! MT @LICivicEngage Tks for pledging to reg. voters this year! @naacp_idf, #ocal1102, @32bj_seiu, #iia, #carecen	10	1.33
Research	OpenSecretsDC: Funders behind anti-Obama energy ads remain hidden: @NewYorker cites our data in a post <a href="http://t.co/5RzKjEXt">http://t.co/5RzKjEXt</a>	3	0.4
Multiple advocacy tactics	NCJW: Check out <a href="http://t.co/Eb4Gz604statement">http://t.co/Eb4Gz604statement</a> sfromsursens&articlesinurstateaboutfedjudnoms. #courtsmatters	3	0.4
Judicial advocacy	InstituteForJustice: Fan of gov't-imposed monopolies? We aren't and we were in court yesterday fighting to stop one in Washington State. <a href="http://t.co/J54TE3yF">http://t.co/J54TE3yF</a>	2	0.27
Coalition building	southerncenter: Thrilled to be part of the coalition! RT @bartoncenter Small Victories For Juvenile Justice <a href="http://t.co/VFS5ScMP">http://t.co/VFS5ScMP</a> . Thanks, @southerncenter!	2	0.27
Media advocacy	MakeTheRoadNY: On Tues tenants will lead press tour showing how Brooklyn Housing Court is overcrowded/inadequate. Advisory: <a href="http://t.co/d5ooERDH">http://t.co/d5ooERDH</a>	1	0.13
Administrative lobbying	americansunited: Catholic shrine declines \$750 "tourism" grant from NY county thanks to a complaint from Americans United. <a href="http://t.co/xBALU3jO">http://t.co/xBALU3jO</a>	1	0.13
Direct lobbying	WithoutViolence: Thank-you to Senator Crapo for your overall leadership on the #realVAWA #reauthorizeVAWA #VAWA	1	0.13
Expert testimony	None	0	0
No advocacy tactic	FreedomWorks: "The Constitution is certain and fixed; it contains the permanent will of the people, and is the supreme law of the land"—William Paterson	391	52.13
	Total	750	100

188 NGO di US tahun 2014  
 Sumber: Guo & Saxton (2014)

## Contoh kasus dan isu diplomasi oleh aktor non negara di AS

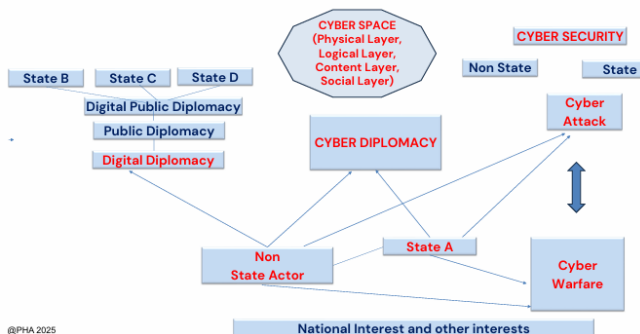


Pemberdayaan publik internasional melalui penyebaran nilai-nilai demokrasi ala AS

## Apa perbedaan *Digital Diplomacy* dan *Cyber Diplomacy* ?

ASPEK	DIGITAL DIPLOMACY	CYBER DIPLOMACY
Definisi	Penggunaan Teknologi Informasi untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik	<i>Coordination on cybersecurity and digital governance</i>
Ruang lingkup	Peningkatan komunikasi dan diplomasi publik	Pembentukan norma dan kerja sama pada isu <i>cyber</i>
Media	Media sosial, <i>online</i> , <i>virtual engagement</i> .	Perjanjian internasional, kerangka <i>cybersecurity</i>
Tantangan	<i>Misinformation</i> , keamanan <i>platform digital</i> , <i>audience engagement</i>	<i>Cyber threats</i> , <i>international consensus</i> , <i>tech integration</i>

## Internet sebagai domain bebas vs kedaulatan

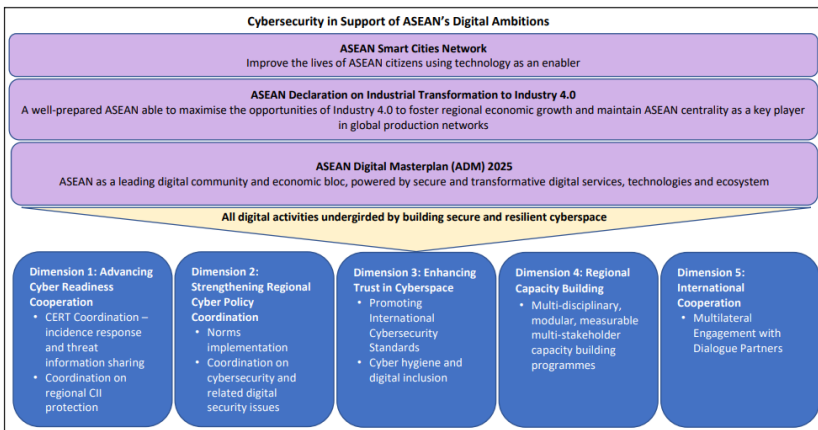


## Mengapa *Cyber Diplomacy* dan *Cyber Security* perlu menjadi perhatian kita?

### *Cyber Threats*

- *People's interests (Computer scientists, Diplomats, Lawyers, Civil Society activists, academics, individuals)*
- *Transborder activity*
- *Transborder coordination*
- *Strategic autonomy*
- *Digital Sovereignty*
- *Geopolitics of Technology*

### Studi Kasus *Cybersecurity ASEAN*



Sumber :

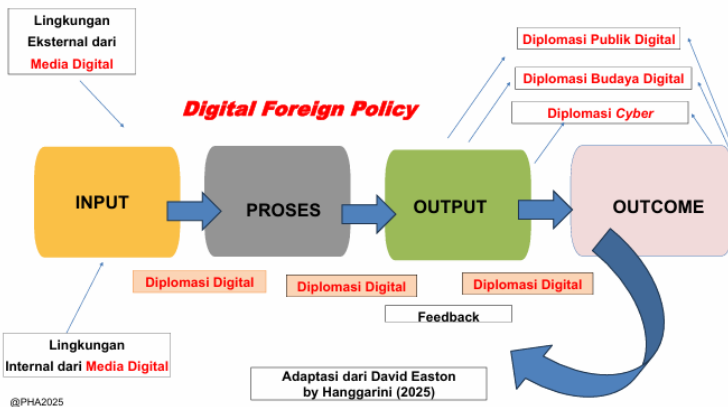
ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy (2021-2025)*

Dokumen kebijakan utama ASEAN; acuan untuk semua program *capacity-building* dan norma regional.

## Studi Kasus *Cyber Diplomacy* China



Belt and Road Initiative (BRI) and Digital Silk Road Initiative (DSRI)



## Digital Foreign Policy

Pemanfaatan teknologi digital sebagai sumber, proses, dan output/outcome kebijakan luar negeri untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional di lingkungan global → Geopolitics of Technology

Contoh Praktik Negara dalam Kebijakan Luar Negeri Digital

## **The Digital Foreign Policies of the US, the PRC and the EU toward Latin America and the Caribbean**

Maximiliano Facundo Vila Seoane  
National University of San Martin, Buenos Aires

Contact: E-mail: [mvila@unsam.edu.ar](mailto:mvila@unsam.edu.ar)

**Authors' version  
Final version can be retrieved from:**

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03932729.2025.2458499>

### **Abstract**

Digital foreign policy is an important area of international relations through which states seek to shape the digital transformation in others. It can be studied by examining the different goals, instruments and resources employed in its formation. Based on this approach, an analysis of the digital foreign policies of the United States (US), the People's Republic of China (PRC) and the European Union (EU) towards Latin America and the Caribbean (LAC) highlights similar goals in terms of shaping regional digital development by advancing their own normative approaches and the interests of their national companies. However, differences were identified in the implementation of such policies.

**Keywords:** digital foreign policy; United States; China; European Union; Latin America and the Caribbean

*Digital Foreign Policy* : arena kebijakan luar negeri dimana negara-negara berusaha melakukan transformasi digital di negara lain. Langkah yang dilakukan diantaranya bantuan infrastruktur digital, pembentukan norma, dan regulasi nilai-nilai digital.

	<b>Economic diplomacy instruments</b>	<b>International development instruments</b>	<b>Science, technology and innovation diplomacy instruments</b>	<b>Defence diplomacy</b>
<b>EU</b>	▪ Global Gateway projects			▪ No
	▪ FTA with digital-related chapters	▪ LAC Cyber Competence Centre	▪ Horizon for funding bi-regional research consortiums	
<b>PRC</b>	▪ MoUs for the digital economy ▪ Trade fairs ▪ Digital Economy Partnership Agreement	▪ Global Development Initiative Projects	▪ Joint laboratories	▪ No
<b>US</b>	▪ Americas Partnership for Economic Prosperity ▪ Clean Network	▪ Partnership for Central America	▪ None	▪ Yes
	▪ Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership			

**Gambar *Digital Foreign Policy*  
yang dilakukan EU, PRC dan US di LAC  
Seoane (2025)**

- *There is no such thing as a free lunch*
- Menolong negara lain tetapi juga melindungi kepentingan diri sendiri
- Infrastruktur seperti kabel bawah laut, jaringan 5G, dan konektivitas broadband menjadi instrumen sentral digital diplomacy
- Program AS seperti *Clean Network* berupaya membatasi pengaruh Tiongkok dalam infrastruktur digital negara-negara mitra. AS juga mengadvokasi cyber defense, intelijen digital, dan standar keamanan tinggi.
- Program China melalui Digital Silk Road, diantaranya pembangunan jaringan 4G/5G, pusat data, e-commerce, satelit, dan kabel laut di negara-negara berkembang. Infrastruktur yang dibangun tergolong cepat dan murah.
- Program Uni Eropa adalah alternatif dari DSI China yaitu *Global Gateway*.

## Praktik Negara dalam Kebijakan Luar Negeri Digital

### Amerika Serikat

- o Strategi Berbasis Keamanan, Pasar, dan Kepemimpinan Teknologi
- o Teknologi cloud (Amazon AWS, Microsoft Azure) menjadi alat diplomasi ekonomi yang kuat.

### China

- o Strategi Berbasis Infrastruktur, Pembangunan, dan Model Otoritatif
- o Perusahaan seperti Huawei, ZTE, Alibaba Cloud, dan TikTok bergerak dalam ekosistem kebijakan negara terintegrasi
- o Retorika "pembangunan bersama", "akses digital yang inklusif", dan "keadilan digital"

### European Union

- o Strategi Berbasis Regulasi, Nilai, dan Standar Global
- o UE menciptakan standar global melalui regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR)
- o hak digital, kebebasan berekspresi, transparansi, dan etika kecerdasan buatan

## Latin America and the Caribbean (LAC)



**Keterangan:**

- Caribbean ≠ Latin America
- Sebagian Caribbean termasuk Latin America yaitu Cuba, Dominican Republic, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panama.
- Sebagian Caribbean tidak termasuk Latin America yaitu Jamaica, Trinidad, Barbados, dll)

**Implikasi**

- LAC menjadi arena kontestasi untuk norma, standar, dan infrastruktur digital yang penting bagi ekonomi, keamanan, dan kedaulatan teknologi kawasan
- Dilema kedaulatan digital → sampai sejauh mana mereka bergantung pada teknologi eksternal, dan bagaimana mereka bisa menjaga kedaulatan data dan infrastruktur digital nasional
- Fragmentasi digital (“digital bifurcation”) di mana negara-negara LAC harus memilih model digital yang mereka adopsi — bisa berdampak pada interoperabilitas, standar teknologi, dan kekuatan tawar di masa depan
- Banyak negara LAC mengadopsi strategi “multi-alignment”: memakai kombinasi sumber teknologi untuk memaksimalkan manfaat (akses teknologi murah dari RRT, layanan cloud & platform AS, serta standar regulatif dari UE).

**Rekomendasi**

Negara LAC perlu menyusun kerangka aturan/hukum :

- Perlindungan data
- Mendorong persaingan lokal
- Mengatur negosiasi kontrak infrastruktur
- Melindungi kepentingan nasional

Peluang, Resiko, Dilema Kedaulatan muncul sehingga mendorong otonomi digital tetapi juga perlu tetap dilakukan kerja sama

### 3. Dampak Teknologi Digital terhadap Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi

Ancaman atau Tantangan atau Peluang?



#### Latihan Soal Bab 10:

1. Uraikan perbedaan dari konsep berikut ini!
  - Diplomasi Digital
  - Diplomasi *Cyber*
  - *Digital Foreign Policy*
2. Sebutkan contoh **diplomasi digital** yang dilakukan oleh salah satu KBRI (Lokasi negara bebas) dan berikan pandangan Anda mengenai diplomasi yang dilakukannya!

\*\*\*

## **BAB 11 ISLAM DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Memahami pengetahuan tentang posisi Indonesia dalam kebijakan luar negeri khususnya dalam hal pengaruh Islam.

### **Pokok Bahasan:**

1. Islam dan Konstitusi 1945
2. Posisi Indonesia terhadap Konflik di Timur Tengah
3. Posisi Indonesia terhadap Konflik di Iran Irak
4. Posisi Indonesia terhadap Konflik di Saudia Arabia Iran
5. Posisi Indonesia terhadap Peristiwa 11/9, Osama Bin Laden
6. Posisi Indonesia terhadap Kelompok Minoritas Muslim:

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang posisi Indonesia dalam kebijakan luar negeri khususnya dalam hal pengaruh Islam.

### **Materi:**

#### **1. Islam dan Konstitusi 1945**

Di dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 telah tercantum Indonesia :

- Sikap Indonesia yang anti penjajahan
- Indonesia bercita-cita menciptakan perdamaian dunia
- Ada nilai keIslaman dan nilai-nilai Pancasila

#### **2. Posisi Indonesia terhadap Konflik di Timur Tengah**

Dalam menghadapi konflik di Timur Tengah, Indonesia telah melakukan dua hal yaitu dengan bergabung dengan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) serta turut aktif untuk menciptakan perdamaian di tengah konflik Israel dengan Palestina.

### **3. Posisi Indonesia terhadap Konflik di Iran Irak**

#### **4.**

Keterlibatan Indonesia di Perang Teluk tidak secara langsung namun jelas Indonesia menyatakan penolakan agresi dan pendudukan wilayah negara lain. Perang Teluk bermula dari invasi Irak ke Kuwait pada Agustus 1990, yang kemudian memicu reaksi keras komunitas internasional. Keterlibatan Indonesia dalam Perang Teluk (Gulf War) 1990–1991 tidak bersifat militer langsung, namun tetap signifikan secara politik, diplomatik, kemanusiaan, dan multilateral.

### **5. Posisi Indonesia terhadap Konflik di Saudia Arabia Iran**

Dalam menghadapi ketegangan antara Arab Saudi dan Iran yang seringkali dikatakan sebagai ketegangan antara Islam Sunni dan Syiah maka posisi Indonesia adalah bersifat netral-aktif, moderat dan fokus kepada upaya penciptaan stabilitas di kawasan. Indonesia tidak melihat konflik ini sebagai konflik antar agama tetapi rivalitas geopolitik dan kepentingan strategis regional di Timur Tengah. Sebagai negara yang didasari prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif maka Indonesia tidak berpihak kepada salah satu pihak dan menganggap kedua negara sebagai mitra penting bagi Indonesia.

### **6. Posisi Indonesia terhadap Peristiwa 11/9, Osama Bin Laden**

Dalam menangani terorisme dan mengadakan interfaith dialogue

- Terorisme
- Interfaith Dialogue

### **7. Posisi Indonesia terhadap Kelompok Minoritas Muslim**

Posisi Indonesia terhadap Kelompok Minoritas Muslim:

- Bosnia
- Rohinya
- Pattani
- Moro

**Latihan Soal Bab 11:**

1. Bagaimana identitas Islam mempengaruhi input dan output kebijakan luar negeri Indonesia sejak masa pemerintahan Habibie hingga saat ini? Apakah bersifat normatif, simbolik, atau substantif?
2. Bagaimana bentuk diplomasi multilateral Indonesia yang memanfaatkan Islam sebagai bagian dari *soft power* nya?

\*\*\*

## **BAB 12 EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA: DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Mampu memahami diplomasi Indonesia dalam konteks kerja sama dengan institusi Dunia.

### **Pokok Bahasan:**

1. Institusi Dunia dalam Perkembangan Ekonomi Global: IMF, World Bank, WTO, G20, OECD
2. Institusi Dunia yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Indonesia : IMF, World Bank, ADB, WTO
3. Tujuan Diplomasi Ekonomi Indonesia
4. Hasil Diplomasi Ekonomi Indonesia

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

Mahasiswa mampu menjelaskan diplomasi Indonesia dalam konteks kerja sama dengan institusi Dunia.

### **Materi:**

#### **1. Institusi Dunia dalam Perkembangan Ekonomi Global: IMF, World Bank, WTO, G20, OECD**

Beberapa peran strategis yang dijalankan oleh institusi dunia diantaranya adalah:

1. Menciptakan stabilitas keuangan global. IMF menjaga stabilitas sistem moneter internasional. IMF melakukan berbagai upaya diantaranya pengawasan ekonomi, pinjaman darurat, dan rekomendasi kebijakan bagi negara yang mengalami krisis.
2. Mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan. World Bank memiliki program jangka panjang terutama dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan reformasi institusi di negara berkembang.

3. Mengatur perdagangan internasional. WTO berupaya mengawasi perdagangan global diantaranya dengan menyelesaikan sengketa dagang, mendorong liberalisasi perdagangan dan juga meningkatkan arus barang dan jasa lintas negara.
4. Mengatur kebijakan ekonomi global. G20 berupaya menjadi koordinator bagi penanganan krisis global, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan menstabilkan pasar keuangan dunia.
5. Mengatur standar dan praktik kebijakan global diantaranya melalui riset, data dan rekomendasi kebijakan. OECD merupakan institusi yang megupayakan hal ini diantaranya mengatur pembangunan berkelanjutan, tata kelola, pajak, dll.

## **2. Institusi Dunia yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Indonesia : IMF, World Bank, ADB, WTO**

Sebagai suatu institusi dunia yang paling berpengaruh terhadap ekonomi dunia, IMF menjadi institusi yang berperan penting bagi ekonomi Indonesia terutama dalam membentuk kerangka kebijakan makroekonomi, dan tata kelola ekonomi sejak era Reformasi.

World Bank serta ADB juga berperan dalam pembangunan serta WTO juga memberikan pengaruh penting bagi integrasi perdagangan global.

## **3. Tujuan Diplomasi Ekonomi Indonesia**

1. Peningkatan Ekspor
2. Peningkatan Investasi Asing
3. Kerja sama Ekonomi dengan negara lain
4. Peningkatan daya asing produk Indonesia

## **4. Hasil Diplomasi Ekonomi Indonesia**

1. Perjanjian Dagang Bilateral
2. Investasi Asing
3. Peningkatan Ekspor

**Latihan Soal Bab 12:**

1. Menurut Anda, bagaimana bentuk diplomasi Indonesia terhadap OECD?
2. Apakah Anda sepakat bahwa Indonesia sangat terbantu oleh IMF?

\*\*\*

## **BAB 13 DIMENSI POLITIK DAN KEAMANAN PADA DIPLOMASI INDONESIA**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Memahami dimensi politik dan keamanan pada diplomasi Indonesia dengan studi kasus terorisme dan kejahatan transnasional negara-negara tetangga.

### **Pokok Bahasan:**

1. Tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Indonesia vs Malaysia

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

Mahasiswa mampu menjelaskan dimensi politik dan keamanan pada diplomasi Indonesia dengan studi kasus terorisme dan kejahatan transnasional negara-negara tetangga.

### **Materi:**

Beberapa hal merupakan elemen penting bagi dimensi politik dan keamanan pada diplomasi Indonesia, diantaranya:

#### **1. Tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan**

- Keamanan maritim dan kedaulatan wilayah laut diman terjadi penangkapan ikan illegal, pelanggaran wilayah oleh kapa asing, dan maraknya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perompakan, dan perdagangan manusia.
- Batas wilayah yang sering memicu konflik dengan negara tetangga diantaranya penetapan batas ZEE.
- Kerentanan terhadap perubahan iklim dan kerusakan alam baik di darat maupun di laut
- Ketimpangan ekonomi antara wilayah di Indonesia

## **2. Diplomasi Indonesia dalam Sengketa Indonesia vs Malaysia**

Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia tidak luput dari pertikaian yang apabila tidak dapat dikelola maka dapat berubah menjadi konflik. Pertikaian ini bersifat politis dan berdimensi keamanan pula. Beberapa konflik dan diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara adalah :

1. Sengketa Sipadan-Ligitan yang diselesaikan pada Mahkamah Internasional 2002 dimana kedua pulau dinyatakan menjadi milik Malaysia.
2. Sengketa perbatasan maritim di Ambalat karena adanya klaim tumpang tindih landas kontinen dan ZEE serta insiden patroli militer
3. Sengketa terkait isu-isu tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia karena kesalahpahaman dalam perlindungan pekerja migran misalnya.

### **Latihan Soal Bab 13:**

1. Bagaimana politik domestik mampu memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terutama di bidang keamanan?
2. Menurut Anda, apakah prinsip bebas aktif masih relevan dijadikan pijakan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam dinamika geopolitik di Indo-Pasifik?

\*\*\*

## **BAB 14 PERUBAHAN SIFAT DIPLOMASI GLOBAL**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Memahami posisi Indonesia dalam kebijakan luar negeri dalam menghadapi perubahan sifat diplomasi global.

### **Pokok Bahasan:**

1. Perubahan Metode Diplomasi
2. Penambahan Aktor Diplomasi
3. Perluasan Agenda Diplomasi
4. Pergeseran Norma Diplomasi

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

Mahasiswa mampu menjelaskan posisi Indonesia dalam kebijakan luar negeri dalam menghadapi perubahan sifat diplomasi global.

### **Materi:**

#### **1. Perubahan Metode Diplomasi**

- *Hybrid* tidak lagi sekedar tatap muka tetapi juga menggunakan teknologi digital
- Diplomasi di tingkat regionalism menguat, muncul format kelompok-kelompok kecil diplomasi misalnya minilateralism

#### **Bagaimana dengan Indonesia?**

- Presiden Prabowo cenderung menguatkan diplomasi dengan tatap muka secara langsung
- ASEAN menegaskan diri sebagai wadah solidaritas di tengah ketidakpastian kondisi sistem internasional

#### **2. Penambahan Aktor Diplomasi**

- Aktor non negara termasuk individu atau publik makin berperan

#### **Bagaimana dengan Indonesia?**

- Peningkatan kerja sama di industri pertahanan dengan beberapa negara

- Presiden masih mendominasi diplomasi Indonesia → telah melakukan 36 kunjungan di 25 negara

### **3. Perluasan Agenda Diplomasi**

Diplomasi terkait isu ekonomi, supply chain, energi, dan teknologi  
Bagaimana dengan Indonesia?

- Proyek transisi energi dan proyek energi terbarukan antara Indonesia dengan China dan Inggris
- Keanggotaan BRICS sebagai peluang untuk perluasan pasar dan kerja sama

### **4. Pergeseran Norma Diplomasi**

- Solidaritas di berbagai tingkat: global, nasional
- Diplomasi dilakukan secara cepat

Bagaimana dengan Indonesia?

- Indonesia bersikap aktif menanggapi isu internasional untuk menunjukkan solidaritas global
- Diplomasi yang dilakukan secara cepat tidak melalui birokrasi yang panjang

### **Latihan Soal Bab 14:**

1. Bagaimana perubahan metode dan aktor memengaruhi cara Indonesia berdiplomasi di masa pemerintahan Prabowo Subianto?
2. Bagaimana perluasan agenda dan pergeseran norma mengubah diplomasi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Subianto?

\*\*\*

## **BAB 15 STUDI KASUS DIPLOMASI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA**

### **Tujuan Perkuliahan:**

Mampu menguraikan suatu studi kasus berdasarkan konsep dan teori diplomasi dan kebijakan luar negeri yang telah dipelajari sepanjang perkuliahan .

### **Pokok Bahasan:**

1. Frekuensi Diplomasi Indonesia ke China
2. Tujuan Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo ke China
3. Hasil Diplomasi Indonesia ke China

### **Kemampuan Akhir yang diharapkan:**

Mahasiswa mampu melakukan analisa suatu studi kasus berdasarkan konsep dan teori diplomasi dan kebijakan luar negeri yang telah dipelajari sepanjang perkuliahan .

### **Materi:**

#### **1. Frekuensi Diplomasi Indonesia ke China**

Semenjak Prabowo Subianto menjadi Presiden, telah dua kali dilangsungkan kunjungan kenegaraan Indonesia ke China yaitu pada:

- Kunjungan kenegaraan pertama (Nov 2024). China merupakan negara pertama yang dikunjungi Prabowo setelah resmi menjadi Presiden RI, menandakan prioritas hubungan bilateral Indonesia–China di bawah kepemimpinannya
- Kunjungan singkat menghadiri undangan khusus (Sep 2025). Prabowo hadir di Beijing kurang dari 8 jam untuk menghadiri Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Rakyat Tiongkok, atas undangan Presiden Xi.

Rencana kunjungan pada Agustus 2025 tidak terlaksana karena adanya situasi domestik yang tidak kondusif.

## **2 Tujuan Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo ke China**

Kunjungan Prabowo bertujuan untuk:

1. Meningkatkan hubungan bilateral yang strategis dengan China
2. Mempertemukan puluhan pengusaha kedua negara dan menjajaki peluang investasi.

Apakah kunjungan Presiden Prabowo menghadiri parade militer China 2025 merupakan sinyal menentang AS?

Pelajari informasi berikut ini:

<https://www.republika.id/posts/58930/apa-maksud-kehadiran-presiden-prabowo-di-beijing>



## **3 Hasil Diplomasi Indonesia ke China**

- Kemitraan Indonesia dan China telah berevolusi dari kerangka empat pilar menjadi lima pilar komprehensif yang mencakup politik, ekonomi, maritim, sosial budaya, dan keamanan.
- Kerja sama sejumlah program prioritas seperti pengelolaan sumber daya alam, pencapaian swasembada pangan dan energi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industri hilir yang juga membutuhkan kerja sama dari China.

Informasi lebih lanjut:

<https://jogja.antaranews.com/berita/778761/dubes-kunjungan-presiden-dan-komitmen-ekonomi-bentuk-eratnya-ri-china?>

**Latihan Soal Bab 15:**

1. Berdasarkan studi kasus tersebut,, apakah dapat dikatakan bahwa proses pengambilan keputusan bagi diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap China ada sepenuhnya di tangan Presiden?
2. Menurut Anda, apakah efek jangka panjang dari diplomasi Indonesia terhadap China pada masa pemerintahan Prabowo Subianto?

\*\*\*

## **BAB 16 LATIHAN SOAL**

1. Menurut Anda, peningkatan kualitas diplomasi Indonesia pada bidang mana yang perlu ditingkatkan?
  - Isu Teknologi digital dan ruang siber
  - Isu Islam dalam kebijakan luar negeri
2. Coba buatlah kerangka Draft Artikel Jurnal berdasarkan materi topik perkuliahan DKLNI yang mengandung unsur:
  - Abstrak
  - Latar Belakang
  - Pertanyaan Penelitian
  - Penelitian terdahulu
  - Kerangka Pemikiran
  - Metodologi Penelitian
  - Hasil dan Diskusi
  - Kesimpulan
  - Daftar Pustaka

Catatan: Tidak ada pembatasan maksimal jumlah halaman, sesuaikan dengan persyaratan jurnal yang dituju.

\*\*\*

## DAFTAR REFERENSI

### Sumber Artikel Jurnal dan Buku

- ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy* (2021-2025)
- Balzacq, Thierry, Frédéric Charillon, Frédéric Ramel (eds.). (2020). *Global Diplomacy. An Introduction to Theory and Practice*. Palgrave Macmillan, Switzerland.
- Berridge, G.R. (2022). *Diplomacy, Theory and Practice*. Palgrave Macmillan. Switzerland.
- Bjola, Cornelius & Marcus Holmes. 2015. *Digital Diplomacy, Theory and Practice*. Routledge, London.
- Gup, Chao Guo and Gregory D. Saxton. (2014). "Tweeting Social Change: How Social Media are Changing Nonprofit Advocacy." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. Vol. 43, No. 1
- Hanggarini, Peni. (2024). Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional. Arta Media Nusantara. Banyumas.
- Hanson, Fergus. 2012. "Revolution @State: The Spread of Ediplomacy," dalam in Adesina. 2017. "Foreign Policy in an era of Digital Diplomacy." *Cogent Social Sciences*. Vol. 3. Issue 1.
- Iswardhana, Muhammad Ridha (2025). "Analysis of President Prabowo's Foreign Policy: Indonesia's Existential Diplomacy in Joining of BRICS and OECD," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 3. September 2025
- Khan, Laeeq et. al. "Public Engagement Model to Analyze Digital Diplomacy on Twitter: A Social Media Analytics Framework," *International Journal of Communication* 15 (2001), 1741-1769.
- Melissen, J. (2005) *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan, Basingstoke. <https://doi.org/10.1057/9780230554931>
- Nip, Joyce Y.M & Sun, Chap. 2022. "Public Diplomacy, Propaganda, or What? China's Communication Practices in the South China Sea Dispute on Twitter." *Journal of Public Diplomacy* Vol. 2, No. 1: 43-68
- Nye, Joseph S. 2004. *Soft Power – The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.

- Pajtinka, E. (2019). Public Diplomacy as a Theoretical Problem: Searching for a Definition. *European Journal of Transformation Studies*, 7(2), 21–32. Retrieved from <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/journal-transformation/article/view/5006>
- Prammeswari, Magfira Insan, Hafid Adim Pradana, and Devita Prinanda. (2025). “Indonesia’s Response to the CPO Trade Conflict with the European Union: A Two-Level Games Analysis,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*. Vol. 13, No. 1, hlm. 21-33.
- Seoane, Maximiliano Facundo Vila. (2025). “The Digital Foreign Policies of the US, the PRC and the EU toward Latin America and the Caribbean.” *The International Spectator*, 1–20
- Setiawan, Asep (2024). “Indonesia’s Foreign Policy Trajectory Under President Prabowo Subianto: Balancing Assertiveness and Pragmatism in an Evolving Global Order.” *Comserva. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 4. No. 8.
- Siracusa, Joseph .M (2021). *Diplomatic History. A Very Short Introduction*. Oxford University Press, United Kingdom.
- Sharp, Paul. (2019). *Diplomacy in the 21st Century. A Brief Introduction*. Routledge. Oxon.
- Shoelhi, Mohammad. (2011). *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Yani, Yanyan Mochmad. (2009). “Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy.” *Sociohumaniora, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 11. No. 1.
- Yeremia, Ardhitya Eduard. (2020). “Sukarno and Colonialism: An Analysis of Indonesia’s Foreign Policy Discourse, 1955-1961.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 16. No. 1.

### Sumber Internet

- Jager. Jeff Jager (2023) “*American Foreign Policy Decision-Making at the Agency Level: The Department of State as Exemplar?*” <https://www.fp21.org/publications/foreign-policy-decision-making-at-the-agency-level>
- <https://www.voaindonesia.com/a/perbedaan-kebijakan-luar-negeri-biden-dan-trump/5640521.html>
- <https://mediapknonline.blogspot.com/2020/01/peran-indonesia-di-perserikatan-bangsa-bangsa.html>
- <https://www.antaraneews.com/infografik/1906032/lima-resolusi-gagasan-indonesia-disahkan-pbb>

- <https://www.republika.id/posts/58930/apa-maksud-kehadiran-presiden-prabowo-di-beijing>
- <https://jogja.antarane.ws.com/berita/778761/dubes-kunjungan-presiden-dan-komitmen-ekonomi-bentuk-eratnya-ri-china>

\*\*\*

## PROFIL PENYUSUN



Peni Hanggarini adalah Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta. Ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan gelar Master of Arts dalam Ilmu Hubungan Internasional dari Australian National University Canberra, Australia. Pendidikan Sarjana Strata 1 ditempuh di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Peni juga merupakan *Women in Foreign Policy Fellow* pada *Foreign Policy Community Indonesia* (FPCI) dan *Fellow* pada *Center for Geopolitics and Geostrategy Studies Indonesia* (CGSI). Minat utamanya adalah topik terkait diplomasi pertahanan, kebijakan luar negeri dan politik internasional.\*\*\*